

**Pengaruh PDRB, Upah Minimum, Inflasi dan IPM Terhadap Penyerapan
Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2018**

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Astriz Shafira

Nomor Mahasiswa : 16313142

Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
YOGYAKARTA

2020

**Pengaruh PDRB, Upah Minimum, Inflasi dan IPM Terhadap Penyerapan Tenaga
Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2018**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata-1

Program Studi Ilmu Ekonomi, pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Astriz Shafira

Nomor Mahasiswa : 16313142

Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

YOGYAKARTA

2020

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FBE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/ sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Februari 2020

Penulis,

A yellow postage stamp with the text "METERAI TEMPEL" at the top, "6000" in large numbers, and "ENAM RIBURUPIAH" at the bottom. The stamp features a small emblem and a serial number "899AAAHF333068894". A handwritten signature is written over the stamp.

Astriz Shafira

PENGESAHAN

Pengaruh PDRB, Upah Minimum, Inflasi dan IPM Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2018

Nama : Astriz Shafira

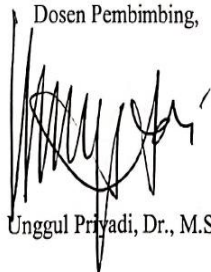
Nomor Mahasiswa : 16313142

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 6 Februari 2020

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Unggul Priyadi, Dr., M.Si.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH PDRB, UPAH MINIMUM, INFLASI DAN IPM TERHADAP PENYERAPAN
TENAGA KERJA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010-2018**

Disusun Oleh : **ASTRIZ SHAFIRA**

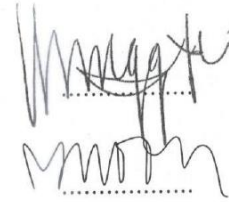
Nomor Mahasiswa : **16313142**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Rabu, tanggal: 18 Maret 2020

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Unggul Priyadi Dr.,M.Si.

Penguji : Indah Susantun, Dra., M.Si.



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

Abah dan Mama tersayang (Fuad Djauhary dan Norbaiti)

Kakak dan Adik tercinta (Rusdawaty Djauhary, Anwari Djauhary, Efti Raida, Rain Al-falah, Najla Nindyasari, Ermira Zenifa dan adikku M. Irfan Jadid)

Suami yang kusayangi dan kucintai M. Zikri Zulfikar Yudistira

HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah: 6)

“Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman dan berilmu di antaramu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

(Q.S Al-Mujadilah: 11)

“Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan.”

(Ali bin Abi Thalib)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahilahihirobil'allamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pengaruh PDRB, Upah Minimum, Inflasi dan IPM Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2018. Sebagai salah satu syarat kelulusan Strata 1 Ekonomi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, penulis akan banyak menemukan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT atas segala sesuatu yang telah diberikan kepada penulis
2. Kedua orang tua tercinta mama Norbaiti dan abah Fuad Djauhary yang tidak berhenti memberikan doa, kasih sayang, semangat, nasehat, dan pengorbanan yang tidak ada habisnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dan hingga dijenjang selanjutnya.
3. Saudara kandungku, Rusdawaty Djauhary, Anwari Djauhary, Efti Raida, Rain Al-falah, Najla Nindyasari, Ermira Zenifa dan adikku M. Irfan Jadid yang selalu menemani dan menyemangati dalam keadaan senang maupun sedih.
4. Seseorang yang selalu ada di sampingku, pelengkap dalam kurang dan lebih, selalu menyemangati agar terus menjadi pribadi yang lebih baik , dan selalu

membantu dalam hal apapun hingga skripsi ini selesai, ia adalah suamiku tercinta M. Zikri Zulfikar Yudistira. Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan dan rizky yang melimpah untukmu.

5. Bapak Dr. Unggul Priyadi, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi, yang sangat baik dan penuh kesabaran telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi dalam terselesaikan dengan baik dan pelajaran hidup untuk bekal penulis kedepannya.
6. Bapak Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D. selaku dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII, Bapak Drs. Agus Widarjono, M.A., Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, Bapak Dr. Sahabudin Sidiq, S.E., M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Ekonomi, dan seluruh Bapak/Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberi ilmu selama penulis menuntut ilmu di Universitas Islam Indonesia.
7. Sahabat-sahabat di SMA Elia, Nisa, Lia, Memey, Dian dan Astri yang selalu memberikan dukungan dan tempat berbagi cerita.
8. Seluruh Teman-teman seperjuangan di FE UII, Febriani Indah, Theresa Kintan, Bella Rizky, Fathya dan teman-teman lainnya, yang telah banyak membantu dan memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.
9. Keluarga KKN Unit 279 Bahar, Pindo, Gufran, Fionna, Billa, dan Ayas yang sudah menemani selama satu bulan dan banyak memberikan pelajaran dalam hidup.

10. Semua teman dekat penulis dan orang-orang sekitar penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu berdoa demi kebaikan penulis dan motivasi sekaligus semangat dalam hidup penulis.

Penulis menyadari, tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Penulis juga menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada banyak kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 6 Februari 2020

Penulis,

Astriz Shafira

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
PENGESAHAN	iii
PENGESAHAN UJIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	11
2.1 Kajian Pustaka.....	11
2.2 Landasan Teori.....	14
2.2.1 Tenaga Kerja	14
2.2.2 Penyerapan Tenaga Kerja	15
2.2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	16
2.2.4 Upah Minimum Kabupaten/Kota.....	17
2.2.5 Inflasi.....	17
2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	18
2.3 Kerangka Pemikiran.....	19

2.4	Hubungan Antar Variabel.....	20
2.4.1	Hubungan antara PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	20
2.4.2	Hubungan antara Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	20
2.4.3	Hubungan antara Inflasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	21
2.4.4	Hubungan antara IPM terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	22
2.5	Hipotesis Penelitian.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....		24
3.1	Jenis dan Sumber Data.....	24
3.2	Definisi Operasional Variabel.....	25
3.3	Metode Analisis.....	26
3.4	Estimasi Model Regresi Data Panel	27
3.4.1	Model Common Effects	27
3.4.2	Model Fixed Effects	28
3.4.3	Model Random Effects	29
3.5	Analisis Data.....	30
3.5.1	Uji Pemilihan Model Regresi.....	30
3.5.2	Uji Statistik	31
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....		33
4.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	33
4.2	Hasil dan Analisis.....	39
4.2.1	Pemilihan Model	39
4.2.2	Model Regresi Panel Fixed Effect	40
4.2.3	Pengujian Hipotesis.....	42
4.3	Analisis antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.....	44
4.4	Pembahasan.....	46
4.4.1	Analisis Pengaruh PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	46
4.4.2	Analisis Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	47
4.4.3	Analisis Pengaruh Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	48
4.4.4	Analisis Pengaruh IPM Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	49
BAB V PENUTUP.....		51

5.1	Kesimpulan.....	51
5.2	Implikasi.....	53
	DAFTAR PUSTAKA	54
	LAMPIRAN.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah 2010-2018	2
Tabel 1.2 Jumlah Tenaga Kerja yang Berkerja dan Total Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah 2010-2018	3
Tabel 1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum (UMK) , Inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	4
Tabel 2.1 Pemetaan Kajian Pustaka	11
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif	34
Tabel 4.2 Uji Chow	39
Tabel 4.3 Uji Hausman	40
Tabel 4.4 Model Fixed Effect	41
Tabel 4.5 Hasil Uji F	44
Tabel 4.6 Koefisien antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	45

DAFTAR GAMBAR

2.1 Gambar Kerangka Pemikiran.....	19
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Data Penelitian	57
Lampiran II Hasil Estimasi Common Effect.....	73
Lampiran III Hasil Estimasi Fixed Effect	74
Lampiran IV Hasil Estimasi Random Effect	75
Lampiran V Hasil Uji Chow	76
Lampiran VI Hasil Uji Hausman	77

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ,Upah Minimum, Inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2018. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. Data berbentuk panel yaitu gabungan antara data *time series* dan *cross section*. Adapun model yang paling tepat dalam penggunaan data panel adalah *fixed effect Model*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Secara simultan PDRB, Upah Minimum, Inflasi dan IPM secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Kata Kunci: Penyerapan Tenaga Kerja, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum, Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Provinsi Jawa Tengah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu faktor pendukung pembangunan ekonomi yang merata. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki penduduk dengan jumlah yang banyak di dunia, hal ini membuat para ahli ekonomi berpendapat bahwa dengan terus meningkatnya perkembangan jumlah penduduk bisa menjadi salah satu faktor pendorong pembangunan. Perkembangan jumlah penduduk tersebut yang jika dibekali pendidikan kepada masyarakat sebelum menjadi tenaga kerja sehingga memungkinkan masyarakat mempunyai keahlian dan keterampilan. Oleh karena itu, penambahan penduduk dengan kualitas sumberdaya yang bagus dapat memberikan sumbangan yang lebih besar bagi pengembangan kegiatan ekonomi sehingga jumlah tenaga kerja yang terserap meningkat (Kompasiana,2019).

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang banyak, namun jumlah angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan tinggi. Hal tersebut menjadi suatu masalah yang belum dapat teratasi karena kualitas sumber daya manusianya yang masih rendah dan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak seimbang dengan jumlah angkatan kerja yang tersedia. Dengan adanya permasalahan tersebut diperlukan peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui pelatihan dan pendidikan. Pelatihan dan pendidikan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan kreatifitas masyarakat dalam bekerja agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. Semakin tinggi keahlian dan kreatifitas yang dimiliki maka akan

meningkatkan produktivitas kerja. Maka dari itu sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan keahlian yang baik akan menjadi modal utama untuk memperoleh pekerjaan sedangkan orang yang tidak mampu bersaing akan tersingkir dan menjadi pengangguran (Kemenperin, 2017)

Demi meningkatkan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan, pemerintah harus mampu menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Pemerintah harus mampu menciptakan sumber daya manusia yang mempunyai keterampilan dan keahlian karena ini merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah 2010-2018

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Perubahan
2010	32.443.886	
2011	32.725.378	0,87%
2012	32.998.692	0,84%
2013	33.264.339	0,81%
2014	33.522.663	0,78%
2015	33.774.141	0,75%
2016	34.019.095	0,73%
2017	34.257.865	0,70%
2018	34.490.835	0,68%

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2010-2018

Perkembangan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan. Dari data yang telah di dapatkan jumlah penduduk pada tahun 2010 sebesar 32.443.886 jiwa dan pada tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah penduduk menjadi 34.490.835 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya jumlah penduduk yang terjadi disetiap tahunnya diharapkan pemerintah

mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar mampu menghasilkan produksi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan mengurangi jumlah pengangguran karena semakin banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia dan jumlah tenaga kerja yang terserap akan meningkat.

Tabel 1.2 Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja dan Total Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah 2010-2018

Tahun	Tenaga Kerja (Jiwa)	Angkatan Kerja
2010	15.809.447	16.856.330
2011	15.822.765	17.026.107
2012	16.531.395	17.513.488
2013	16.469.960	17.524.022
2014	16.550.682	17.547.026
2015	16.435.142	17.298.925
2016	16.435.142	17.298.925
2017	17.186.674	18.010.612
2018	17.245.548	18.059.895

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2010-2018

Angkatan kerja merupakan penduduk yang memasuki usia kerja yaitu 15-64 tahun yang sudah memiliki pekerjaan maupun sedang mencari pekerjaan (BPS, 2016). Jumlah angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah meningkat disetiap tahunnya. Jumlah tingkat penyerapan tenaga kerja yang sudah bekerja atau memiliki pekerjaan di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan angka tenaga kerja

yang terserap disetiap tahunnya. Tabel 1.2 di atas menunjukkan jumlah tenaga kerja yang terserap pada tahun 2010 sebesar 15.809.447 jiwa dan tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi 15.822.765 jiwa. Tahun 2012 terus mengalami peningkatan menjadi 16.531.395 jiwa dan mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 16.469.960 jiwa kemudian naik menjadi 16.550.682 jiwa pada tahun 2014. Terjadi penurunan lagi di tahun 2015 menjadi 16.435.142 jiwa dan naik menjadi 16.435.142 jiwa pada tahun 2016. Tahun 2017 juga mengalami kenaikan jumlah tenaga kerja yang bekerja menjadi 17.186.674 jiwa. Tahun 2018 kemudian juga naik menjadi 17.245.548 jiwa.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa penyerapan tenaga kerja terjadi perubahan kenaikan dan penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja yang belum maksimal. Pemerintah harus terus berupaya agar penyerapan tenaga kerja semakin meningkat dengan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Tabel 1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum (UMK), Inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tahun	PDRB (Juta Rupiah)	UMP (Rupiah)	INFLASI (Persen)	IPM (Nilai Peringkat)
2010	623.224.621,3	660.000	6,88	66,08
2011	658.003.645,3	675.000	2,68	66,64
2012	690.461.017,1	765.000	4,24	67,21
2013	726.652.111,1	830.000	7,99	68,02
2014	763.219.713,9	910.000	8,22	68,78
2015	805.107.511,9	910.000	2,73	69,49
2016	849.077.575,8	1.265.000	2,36	69,98
2017	893.430.375,6	1.367.000	3,71	70,52
2018	940.759.745,2	1.486.065	3,10	71,12

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2010-2018

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau jumlah seluruh nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah pada periode tertentu (BPS, 2016). Data Produk Domesik Regional Bruto di atas adalah berdasarkan harga konstan dengan tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010. PDRB ini untuk menilai produksi barang dan jasa dalam perekonomian secara keseluruhan dan tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, perubahan PDRB yang terjadi setiap tahunnya hanya mencerminkan perubahan jumlah yang diproduksi. Jumlah PDRB yang besar menunjukkan jumlah produksi yang dilakukan suatu wilayah semakin banyak sehingga membutuhkan jumlah tenaga kerja yang semakin besar. Dari tabel 1.3 yang menjelaskan pada tahun 2010 sampai 2018 produk domestik regional bruto setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 PDRB sebesar Rp. 623.244.621,3 juta rupiah sedangkan tahun 2011 naik menjadi Rp. 658.003.645,3 juta rupiah dan mengalami kenaikan menjadi Rp. 690.461.017,1 juta rupiah di tahun 2012. Tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi Rp. 726.652.111,1 juta rupiah kemudian di tahun 2014 naik menjadi Rp. 763.219.713,9 juta rupiah. Tahun 2015 terus mengalami jumlah kenaikan menjadi Rp. 805.107.511,9 juta rupiah sedangkan tahun 2016 naik menjadi Rp. 849.077.575,8 juta rupiah dan terus mengalami kenaikan menjadi Rp. 893.430.375,6 juta rupiah di tahun 2017. Tahun 2018 PDRB Jawa Tengah naik menjadi sebesar Rp. 940.759.745,2 juta rupiah.

Di Indonesia upah minimum terus mengalami peningkatan, hal tersebut merupakan kebijakan yang digunakan pemerintah sebagai standar acuan kepada

pemerintah daerah dalam menetapkan upah minimum regional. Setiap daerah memiliki kondisi upah minimum yang berbeda-beda. Kenaikan tingkat upah harus diiringi dengan peningkatan kualitas pekerja sehingga produksi terus meningkat. (Sekjen OPSI, Timboel Siregar).

Pada Tabel 1.3 upah minimum Provinsi di Jawa Tengah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 upah minimum provinsi sebesar Rp.660.000 dan terus terjadi adanya peningkatan upah sampai tahun 2018 menjadi Rp.1.486.065. Sedangkan pada tahun 2015 tidak terjadi perubahan, sehingga upah minimum tahun 2015 sama dengan upah minimum tahun 2014 sebesar Rp.910.000.

Faktor lain yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja yaitu inflasi. Inflasi merupakan naiknya harga-harga barang maupaun jasa umum secara berkelanjutan. Harga barang dan jasa di dalam negeri yang terus mengalami peningkatan secara terus-menerus, maka akan berdampak pada kenaikan inflasi (BPS,2016). Tinggi rendahnya suatu inflasi akan membuat suatu perusahaan untuk mempertimbangkan dalam merekrut atau menurunkan jumlah tenaga kerja yang ingin dipekerjakan. Tingkat inflasi yang tinggi membuat harga-harga faktor produksi menjadi lebih mahal, hal tersebut akan mempengaruhi pengusaha dalam mengurangi faktor produksi termasuk tenaga kerja. Dari data yang di dapatkan pada tabel 1.3 di atas yang menunjukkan tingkat inflasi di Jawa Tengah berfluktuasi disetiap tahunnya. Inflasi tertinggi di Jawa Tengah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 8,22 persen dan inflasi terendah terjadi pada tahun

2016 yaitu sebesar 2,36 persen. Pada tahun 2018 inflasi di Provinsi Jawa Tengah sebesar 3,10 persen. Inflasi yang terjadi Jawa Tengah termasuk dalam kategori inflasi ringan karena tingkat inflasi di bawah 10 persen per tahun.

IPM juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Indeks Pembangunan Manusia di bentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. Masyarakat dengan kualitas SDM yang baik akan mempunyai kesempatan yang lebih besar dalam mendapatkan pekerjaan. Dari data yang di dapatkan pada Tabel 1.3 IPM dari tahun 2010 sampai tahun 2018 terus mengalami peningkatan. Kenaikan peningkatan IPM menunjukkan bahwa adanya tingkat kesejahteraan yang juga meningkat. Tahun 2010 IPM Jawa Tengah sebesar 66,08 kemudian terus meningkat hingga tahun 2018 menjadi 71,12.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja yang meliputi Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum, Inflasi dan Indeks pembangunan Manusia. Maka dari itu penulis mengangkat judul yaitu **“Pengaruh PDRB, Upah Minimum, Inflasi dan IPM Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/kota Provinsi di Jawa Tengah Tahun 2010-2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah diuraikan di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh PDRB secara parsial terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum secara parsial terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh Inflasi secara parsial terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah?
4. Bagaimana pengaruh IPM secara parsial terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah?
5. Bagaimana pengaruh PDRB, Upah Minimum, Inflasi dan IPM secara simultan atau bersama-sama terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari uraian permasalahan yang di dapat, tujuan dari penelitian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah:

1. Untuk menganalisis secara parsial pengaruh PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk menganalisis secara parsial pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

3. Untuk menganalisis secara parsial pengaruh Inflasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
4. Untuk menganalisis secara parsial pengaruh IPM terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
5. Untuk menganalisis secara simultan atau bersama-sama pengaruh PDRB, Upah Minimum, Inflasi dan IPM terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi akademisi dan mahasiswa yakni untuk menerapkan secara teori yang telah dipelajari selama berada di bangku perkuliahan, menambah pemahaman mengenai ilmu yang dipelajari dan pengetahuan serta untuk membantu mengembangkan ilmu pengetahuan.
2. Manfaat bagi Praktisi yakni hasil penelitian yang diperoleh dapat digunakan untuk mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang diharapkan dapat memperluas wawasan serta bukti empiris mengenai pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum, Inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan

Bab ini membahas tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian.

Bab II. Kajian Pustaka Dan Landasan Teori

Bab ini membahas tentang Kajian Pustaka, Landasan Teori, Kerangka Pemikiran, Hubungan antar Variabel, Hipotesis Penelitian.

Bab III. Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang Jenis dan Sumber Data, Definisi Operasional Variabel, Metode Analisis Data.

Bab IV. Hasil Analisis Dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang Analisis Statistik Deskriptif, dan Hasil Analisis dan Pembahasan.

Bab V. Penutup

Bab ini membahas tentang Kesimpulan dan Implikasi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

5.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah referensi dari penelitian sebelumnya berupa jurnal, skripsi, tesis, dan karya ilmiah lainnya. Dalam bab ini akan mengamati penelitian-penelitian sebelumnya yang masih berhubungan dengan faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Penulisan kajian pustaka ini bertujuan untuk menelaah, mencermati dan mengkaji agar dapat menjadi suatu rujukan pada penelitian serta dapat memperkuat hasil dari analisis tersebut. Kajian pustaka digunakan untuk menghindari duplikasi penulisan karya ilmiah.

Tabel 2.1 Pemetaan Kajian Pustaka

No	Keterangan	Hasil Penelitian
1	<p>Sulistiawati (2012) melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia” berasal dari jurnal EKSOS Universitas Tanjungpura Pontianak.</p> <p>http://riset.polnep.ac.id/bo/upload/penelitian/penerbitan_jurnal/08-eksos%206%20rini%20okt12.pdf</p>	<p>Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa upah berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja yang berarti apabila terjadi kenaikan upah, maka berpotensi untuk menurunkan penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja berpengaruh tidak signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat.</p>

No	Keterangan	Hasil Penelitian
2	<p>Indradewa dan Natha (2015) melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Inflasi, PDRB Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Bali” berasal dari Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana. https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/14385</p>	<p>Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series dari tahun 1994-2013. Hasil penelitian menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan upah minimum memiliki pengaruh yang positif dan signifikan sementara inflasi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali periode tahun 1994-2013.</p>
3	<p>Pangastuti (2015) melakukan penelitian berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Tengah” berasal dari Economics Development Analysis Journal Universitas Negeri Semarang. https://journal.unnes.ac.id</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan yang negatif. Pengaruh UMK, pengangguran dan PAD memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2012.</p>
4	<p>Wasilaputri (2016) melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDRB Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa Tahun 2010-2014” berasal dari jurnal pendidikan dan ekonomi UNY. http://journal.student.uny.ac.id</p>	<p>Upah minimum provinsi memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh positif dan signifikan. Selain itu Investasi berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa.</p>
5	<p>Wihastuti dan Rahmatullah (2018) melakukan penelitian berjudul “Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa” berasal dari Jurnal Gama Societa UGM. https://journal.ugm.ac.id</p>	<p>UMP berpengaruh negatif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada tahun 2011-2016.</p>

No	Keterangan	Hasil Penelitian
6	Ziyadaturrofiqoh dkk (2018) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh PDRB, Upah Minimum Provinsi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jambi" berasal dari Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Universitas Jambi. https://online-journal.unja.ac.id	Data yang digunakan adalah data time series dari tahun 1997–2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan PDRB, UMP, Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan UMP dan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi.

Berdasarkan kajian pustaka di atas, penelitian ini merujuk terhadap penelitian yang diteliti oleh Febryana Rizqi Wasilaputri (2016) dalam jurnal Pendidikan dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam penelitian ini terdapat adanya hubungan antar variabel yang mempengaruhi faktor penyerapan tenaga kerja. Variabel dependen yakni penyerapan tenaga kerja (tenaga kerja) dan variabel independen adalah upah minimum, PDRB, dan investasi. Penelitian tersebut dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2010-2014 dan data tersebut adalah data panel. Penelitian di lakukan pada tahun 2016.

Penelitian tersebut memperoleh hasil dimana secara parsial Upah minimum provinsi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh positif dan

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Selain itu Investasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa tahun 2010-2014.

Dengan demikian, penulis menambahkan variabel dan mengganti dengan variabel lain yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, yakni variabel inflasi dan IPM yang sangat mempengaruhi variabel dependen yaitu jumlah penyerapan tenaga kerja.

5.2 Landasan Teori

5.2.1 Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk yang memasuki usia kerja yaitu 15-64 tahun yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah orang yang mampu menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri maupun untuk masyarakat. Penduduk suatu negara pada umumnya dibagi menjadi dua kelompok, pertama, tenaga kerja yaitu penduduk dengan usia yang sudah memasuki usia kerja. Kedua, bukan tenaga kerja yaitu orang dengan umur 10 tahun ke atas dan kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Tenaga kerja merupakan faktor penggerak paling penting dalam proses produksi dalam menghasilkan barang dan jasa akhir. Setiap kegiatan produksi diperlukan jumlah tenaga kerja yang cukup memadai dan disesuaikan dengan jumlah yang dibutuhkan sampai tingkat tertentu.

5.2.2 Penyerapan Tenaga Kerja

Orang yang mendapat kesempatan untuk berkerja pada suatu pekerjaan yang tersedia disebut dengan kesempatan kerja. Menurut Simanjuntak (2001) teori permintaan suatu komoditi menjelaskan hubungan antara jumlah permintaan kuantitas komoditi dengan jumlah harga. Sehubungan dengan tenaga kerja, penyerapan merupakan hubungan antara tingkat upah dengan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki untuk dipekerjakan. Pertambahan permintaan terhadap tenaga kerja adalah tergantung pada peningkatan jumlah barang dan jasa yang ingin diproduksi akibat adanya permintaan masyarakat akan hal tersebut.

Kenaikan permintaan tenaga kerja tergantung dari jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan diakibatkan dari adanya permintaan masyarakat yang juga meningkat. Terdapat adanya perbedaan antara jumlah barang yang diminta dengan permintaan. Permintaan adalah keseluruhan hubungan antara tingkat upah dengan jumlah permintaan. Sedangkan banyaknya permintaan pada berbagai tingkat harga tertentu adalah merupakan jumlah barang yang ingin diminta (Simanjuntak, 2001).

Permintaan akan tenaga kerja terjadi apabila adanya kebutuhan tenaga kerja yang ingin dipekerjakan oleh suatu unit usaha. Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tingkat upah (Sudarsono, 1988).

Jadi, permintaan tenaga kerja merupakan suatu hubungan dari berbagai tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang diminta. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang diminta adalah banyaknya permintaan tenaga kerja yang ingin dipekerjakan dengan

berbagai tingkat upah. Penyerapan tenaga kerja dalam penelitian ini adalah jumlah banyaknya orang yang bekerja dalam suatu unit usaha tertentu.

5.2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto adalah seluruh jumlah barang dan jasa akhir yang merupakan hasil diproduksi dari kegiatan-kegiatan ekonomi dalam suatu daerah pada periode tertentu (Sasana, 2006). PDRB masing-masing daerah berbeda-beda hal ini tergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Berdasarkan perhitungannya PDRB terbagi menjadi dua yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) dan PDRB atas dasar harga konstan (riil). PDRB atas dasar harga berlaku yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pada setiap tahun, digunakan untuk mengukur kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga konstan Menggunakan tahun dasar untuk menilai produksi barang dan jasa dalam perekonomian karena PDRB atas dasar harga konstan tidak dipengaruhi oleh perubahan harga. Perubahan PDRB atas dasar harga konstan hanya mencerminkan perubahan jumlah yang diproduksi (Mankiw dkk, 2013). Dalam penelitian ini menggunakan harga pada tahun dasar 2010 yang mana PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

5.2.4 Upah Minimum Kabupaten/Kota

Menurut Sumarsono (2003) upah merupakan sebuah imbalan yang harus dikeluarkan pengusaha untuk membayar tenaga kerja atas pekerjaan yang mereka lakukan untuk menghasilkan suatu produk. Dalam peraturan perundang-undangan tentang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa upah atau imbalan yang diterima pekerja dinyatakan dalam bentuk uang dan dibayarkan menurut kesepakatan termasuk tunjangan kinerja untuk pekerja sendiri dan keluarganya.

Upah minimum kabupaten/kota adalah standar upah minimum yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada para pekerjanya. Penetapan upah minimum dilakukan setiap satu tahun sekali oleh gubernur berdasarkan rekomendasi dari Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah.

5.2.5 Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga-harga barang umum yang terjadi secara berkelanjutan dalam perekonomian. Tiap negara memiliki tingkatan angka inflasi yang berbeda-beda setiap periodenya (Sukirno, 2001). Apabila harga barang dan jasa dalam suatu negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa akan menyebabkan turunnya nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum (BPS,2016).

Dalam perekonomian, inflasi terdiri dari beberapa jenis yang di kelompokkan menjadi :

1. Inflasi berdasarkan tingkat keparahannya, yaitu:
 - a. Inflasi ringan, terjadi inflasi pada tingkat di bawah 10% per tahun.
 - b. Inflasi sedang, terjadi ketika tingkat inflasi antara 10%-30% per tahun.
 - c. Inflasi tinggi, terjadi ketika tingkat inflasi antara 30%-100% per tahun, dan
 - d. Hyperinflation, terjadi inflasi pada tingkat di atas 100% per tahun.
2. Inflasi berdasarkan penyebabnya, yaitu:
 - a. *Demand pull Inflation*, merupakan inflasi yang terjadi karena adanya peningkatan agregat permintaan masyarakat. Naiknya permintaan pada beberapa jenis barang sehingga harga barang menjadi naik yang menyebabkan inflasi.
 - b. *Cost push inflation*, merupakan inflasi yang terjadi karena adanya penurunan penawaran agregat. Meningkatnya biaya produksi di pasar yang menaikkan harga sehingga terjadi penurunan produksi (Boediono, 2000)

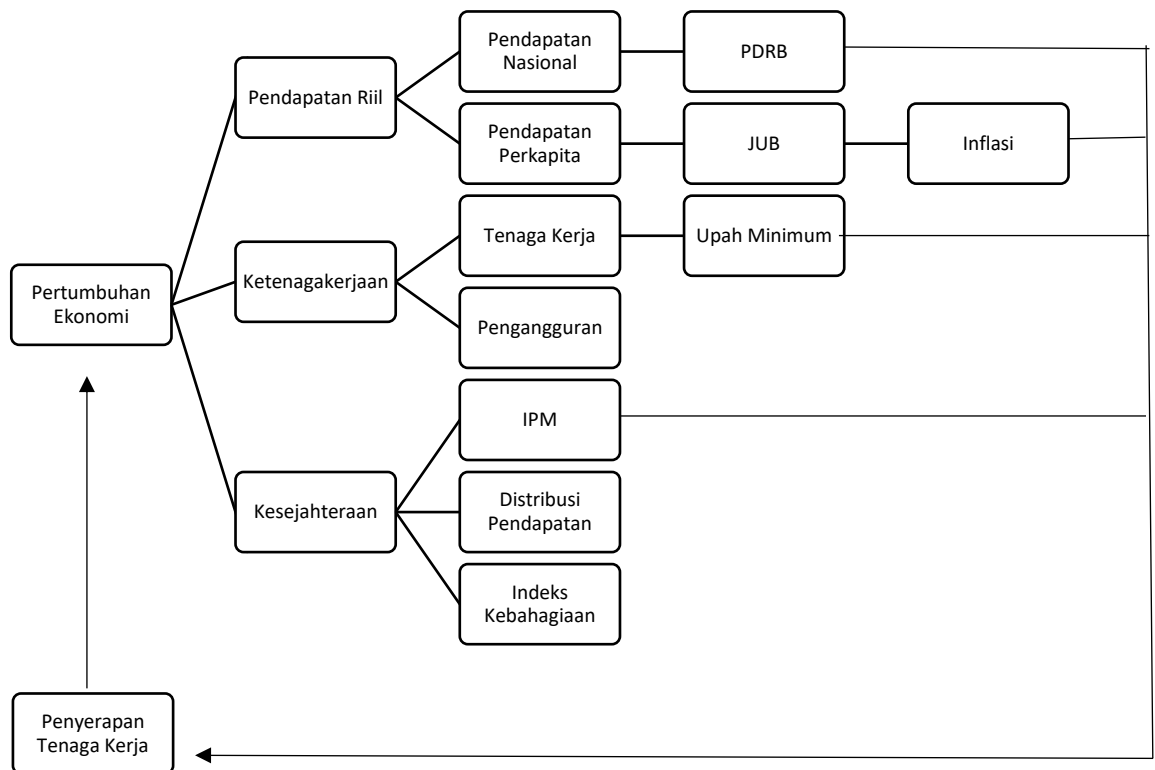
5.2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut Badan Pusat Statistik, dalam mengukur kualitas hidup pembangunan manusia maka ukuran yang dapat digunakan adalah IPM dari suatu wilayah tersebut. IPM menjelaskan bagaimana suatu penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan Pendidikan untuk menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara.

Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) memberikan peringkat tingkatan kinerja pembangunan manusia dengan menetapkan suatu kategori. IPM yang tinggi

mempunyai skala lebih dari 80,0 dan IPM dengan kategori menengah atas yaitu 66,0-79,9. Kategori menengah bawah yaitu IPM antara 50,0-65,9 dan kategori rendah dengan IPM di bawah 50,0.

2.3 Kerangka Pemikiran



5.1 Gambar Kerangka Pemikiran

2.4 Hubungan Antar Variabel

2.4.1 Hubungan antara PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total dari seluruh jumlah barang dan jasa akhir yang diproduksi. PDRB mencerminkan produksi dari suatu perusahaan (Mankiw dkk, 2013). Jadi apabila PDRB dalam suatu wilayah meningkat maka akan diikuti dengan meningkatnya jumlah permintaan tenaga kerja. PDRB yang meningkat akan memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk meningkatkan tenaga kerja sehingga memberikan peluang kerja pada masyarakat. PDRB yang meningkat mencerminkan kemakmuran masyarakat yang juga meningkat, hal ini menyebabkan akan banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga angka pengangguran dapat berkurang (Lincolin, 2010).

2.4.2 Hubungan antara Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Kenaikan tingkat upah akan menyebabkan kenaikan biaya produksi yang mengakibatkan perusahaan akan menaikkan harga barang. Kenaikan harga karena meningkatnya upah, masyarakat akan merespon atas kenaikan harga barang dengan mengurangi konsumsi dan perusahaan akan menurunkan jumlah produksinya. Pengurangan jumlah produksi yang dilakukan oleh perusahaan akan mengakibatkan berkurangnya kebutuhan akan tenaga kerja. Kenaikan upah membuat perusahaan akan lebih memilih menggantikan kebutuhan tenaga kerja dengan teknologi seperti mesin (Sumarsono, 2009). Produksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan mesin akan mengakibatkan berkurangnya kebutuhan akan tenaga kerja.

2.4.3 Hubungan antara Inflasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Nanga (2005), inflasi dalam perekonomian menyebabkan beberapa dampak yang ditimbulkan seperti perubahan tenaga kerja dan output yang dihasilkan. Pada saat terjadi inflasi dimana harga-harga secara relatif berubah terhadap tingkat harga secara umum, akibatnya perusahaan tidak mampu dalam membeli faktor-faktor produksi maka perusahaan akan mengurangi jumlah output yang dihasilkan. Perusahaan yang mengurangi jumlah output secara tidak langsung akan mengurangi penggunaan jumlah tenaga kerja sehingga penyerapan tenaga kerja semakin berkurang.

Inflasi dengan penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan berdasarkan penyebabnya ialah *demand pull inflation* yaitu karena adanya tarikan permintaan. Naiknya permintaan pada beberapa jenis barang tersebut mengakibatkan perusahaan tidak mampu memenuhi kenaikan permintaan produk dari masyarakat. Terjadinya kekurangan produk akan menyebabkan kenaikan harga – harga produk di pasar, sehingga masyarakat akan merespon dengan mengurangi jumlah konsumsi barang tersebut yang berdampak pada pengurangan jumlah tenaga kerja. Selanjutnya karena *cost push inflation* adanya dorongan kenaikan biaya produksi mengakibatkan perusahaan mengalami kenaikan harga faktor input produksi, sehingga terjadi penurunan penawaran agregat. Misalnya kenaikan harga bahan baku dan kenaikan upah tenaga kerja yang digunakan untuk produksi. Akibatnya dengan jumlah modal kerja yang sama akan dihasilkan unit produk yang lebih sedikit dengan harga yang

lebih tinggi. Hal tersebut akan berdampak pada pengurangan jumlah tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja semakin berkurang (Boediono, 2000).

2.4.4 Hubungan antara IPM terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan suatu ukuran yang digunakan dalam mengetahui kualitas hidup pembangunan manusianya. Terdapat beberapa komponen yaitu sehat dan umur Panjang yang mewakili di bidang kesehatan. Pada bidang Pendidikan yaitu lamanya bersekolah, partisipasi sekolah dan angka melek huruf. IPM juga melihat kemampuan daya beli masyarakatnya terhadap jumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata pengeluaran per kapita.

Masyarakat yang memiliki Pendidikan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui keahliannya berkeaktivitas dan mengembangkan ide-ide yang sudah ada. Tingkat Pendidikan yang semakin meningkat berdampak pada pengetahuan masyarakat dan keahlian masyarakat yang meningkat sehingga meningkatkan produktivitas kerja yang tinggi. Produktivitas yang tinggi akan menghasilkan tenaga kerja dengan kualitas yang bagus dan akan memperoleh hasil produksi yang semakin banyak. Produksi dengan memperoleh hasil yang lebih banyak maka pendapatan yang diterima akan menjadi lebih besar dan konsumsi yang juga meningkat. Sehingga Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja (Mulyadi, 2003).

2.5 Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diduga variabel PDRB secara parsial berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.
2. Diduga variabel Upah Minimum secara parsial berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.
3. Diduga variabel inflasi secara parsial berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.
4. Diduga variabel IPM secara parsial berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.
5. Diduga variabel PDRB, upah minimum, inflasi dan IPM secara simultan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data yang digunakan dalam bentuk angka numerik (Widarjono, 2013). Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. Data berbentuk panel yaitu gabungan antara data *time series* dan *cross section* dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018. Dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Data jumlah Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2018 dalam satuan jiwa;
2. Data PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2018 dalam satuan juta rupiah;
3. Data Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2018 dalam satuan rupiah;
4. Data tingkat Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2018 dalam satuan persen;
5. Data IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2018 dalam satuan peringkat nilai;

3.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ada 2 jenis variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen.

a. Variabel dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu:

1. Penyerapan Tenaga Kerja (Y)

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyerapan tenaga kerja yaitu banyaknya jumlah tenaga kerja setiap tahunnya yang bekerja di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018.

b. Variabel independen

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu:

1. Produk Domestik Regional Produk (PDRB) (X1)

PDRB merupakan seluruh total jumlah barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh berbagai kegiatan ekonomi dalam suatu daerah pada periode tertentu (Sasana, 2006). Untuk melakukan regresi data pada penelitian ini, PDRB yang digunakan adalah data Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan tahun 2010. Data PDRB bersumber dari data Badan Pusat Statistik tahun 2010-2018.

2. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) (X2)

UMK adalah standar upah minimum yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada para pekerjanya di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Data UMK

pada penelitian ini adalah data Upah Minimum Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2010-2018.

3. Inflasi (X3)

Inflasi merupakan suatu periode naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus dengan satuan yang digunakan adalah persen. Data inflasi pada penelitian ini adalah data tingkat inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2010-2018.

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X4)

IPM merupakan suatu ukuran yang digunakan dalam mengukur kualitas hidup pembangunan manusianya. Dalam penelitian ini data IPM yang digunakan merupakan data IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2018 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

3.3 Metode Analisis

Regresi data panel adalah model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Regresi data panel merupakan regresi yang menggabungkan data *time series* dengan data *cross section*. Keuntungan menggunakan regresi data panel adalah mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar dan dapat mengatasi masalah yang timbul apabila terjadi penghilangan variabel (omitted variabel) karena mampu menggabungkan informasi dari *data time series dan cross section* (Widarjono, 2013).

3.4 Estimasi Model Regresi Data Panel

Dalam mengestimasi regresi data panel dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

3.4.1 Model Common Effects

Widarjono (2013) menjelaskan bahwa estimasi model *common effects* adalah Teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel yang hanya menggabungkan data *time series* dengan *cross section* tanpa melihat perbedaan antarwaktu dan individu yang bisa diregresi dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Pada penelitian diasumsikan bahwa perilaku data pada Kabupaten/Kota sama dalam berbagai kurun waktu. Model persamaan common effects sebagai berikut:

$$\ln Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 \ln X_{3it} + \beta_4 \ln X_{4it} + e_{it}$$

Dimana:

β = Koefisien intersep

X1 = PDRB (Juta Rupiah)

X2= Upah Minimum Kabupaten/Kota (Rupiah Per Bulan)

X3 = Inflasi (Persen)

X4 = IPM (Peringkat Nilai)

i = banyaknya observasi (Kabupaten/Kota) di Jawa Tengah

t = waktu (Periode Tahun 2010-2018)

3.4.2 Model Fixed Effects

Pada metode *common effect* mengasumsikan bahwa slope dan intersep adalah tidak terdapat perbedaan dari segi waktu dan juga individu. Asumsi demikian ini akan berdampak pada hasil dari data yang akan jauh dari realitanya. Maka dari itu untuk mengetahui adanya perbedaan adalah dengan mengasumsikan bahwa intersep berbeda dengan slope yang tetap sama yang dikenal dengan model regresi *fixed effects* (Widarjono, 2013). Maka persamaan model sebagai berikut:

$$\ln Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 \ln X_{3it} + \beta_4 \ln X_{4it} + e_{it}$$

Keterangan:

B = Koefisien intersep

X1 = PDRB (Juta Rupiah)

X2 = Upah Minimum Kabupaten/Kota (Rupiah Per Bulan)

X3 = Inflasi (Persen)

X4 = IPM (Peringkat Nilai)

i = Banyaknya observasi (Kabupaten/Kota) di Jawa Tengah

t = Waktu (Periode Tahun 2010-2018)

Dalam persamaan ini memberikan (i) pada intersep untuk menunjukkan adanya perbedaan tiap individunya. Dalam estimasi model *fixed effect* dapat dilakukan dengan menggunakan *dummy* model estimasi ini sering disebut dengan *Least Squares Dummy Variables* (LSDV).

3.4.3 Model Random Effects

Widarjono (2013) mengatakan melalui teknik LSDV akan membuat berkurangnya derajat kebebasan atau *degree of freedom* yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Masalah tersebut dapat diatasi dengan menggunakan variabel gangguan (error terms) yang dikenal sebagai metode *random effects*. Pada model *random effects* mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antarwaktu dan antarindividu. Persamaan model ini sebagai berikut:

$$\ln Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 \ln X_{3it} + \beta_4 \ln X_{4it} + \mu_i + e_{it}$$

Keterangan:

β = Koefisien intersep

X_{1it} = PDRB (Juta Rupiah)

X_{2it} = Upah Minimum Kabupaten/Kota (Rupiah Per Bulan)

X_{3it} = Inflasi (Persen)

X_{4it} = IPM (Peringkat Nilai)

μ_i = Random error term

i = Banyaknya jumlah observasi (Kabupaten/Kota) di Jawa Tengah

t = Time/waktu (periode tahun 2010-2018)

3.5 Analisis Data

3.5.1 Uji Pemilihan Model Regresi

Untuk memilih model yang baik dan tepat terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan, yaitu:

3.5.1.1 Uji Chow Test

Dalam menentukan model *Common Effect* atau *Fixed Effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel maka pengujian yang dilakukan adalah *uji Chow*. Dalam pengujian uji Chow diperlukan adanya hipotesis, yaitu:

- H0: Gunakan model *Common Effect*
- H1: Gunakan model *Fixed Effect*

Dengan asumsi:

Apabila $p\text{-value} > \alpha$ (5%), maka H0 diterima

Apabila $p\text{-value} < \alpha$ (5%), maka H0 ditolak

3.5.1.2 Uji Hausman Test

Dalam model baik *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat untuk digunakan adalah dengan menggunakan *uji Hausman*. Pengujian *uji Hausman* dilakukan dengan hipotesis berikut:

- H0 : Gunakan model *Random Effect*
- H1 : Gunakan model *Fixed Effect*

Dengan asumsi:

Apabila $p\text{-value} > \alpha$ (5%), maka H_0 diterima

Apabila $p\text{-value} < \alpha$ (5%), maka H_0 ditolak

3.5.2 Uji Statistik

3.5.2.1 Uji t

Uji t menunjukkan signifikansi pengaruh yang diakibatkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

1. Jika hipotesis signifikan positif
 - a. $H_0: \beta_i = 0$
 - b. $H_1: \beta_i > 0$
2. Jika hipotesis signifikan negatif
 - a. $H_0: \beta_i = 0$
 - b. $H_1: \beta_i < 0$

Dengan asumsi:

- a. Jika nilai nilai Prob. T-statistik $> \alpha$ (0,05) maka H_0 diterima artinya variabel bebas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat, dan
- b. Jika nilai Prob. T-statistik $< \alpha$ (0,05) maka H_0 ditolak artinya variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

3.5.2.2 Uji F

Dalam mengetahui signifikan dan tidaknya suatu variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan diperlukan uji F. Hipotesis yang digunakan untuk menguji koefisien regresi secara bersama-sama adalah:

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$$

$$H_1: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$$

Dengan asumsi:

Jika nilai Prob. F-statistic $> \alpha$ (0,05), maka H_0 yang diterima yang artinya seluruh variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen. Jika nilai Prob. F-statistic $< \alpha$ (0,05), maka H_1 yang diterima dan H_0 ditolak yang artinya seluruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

3.5.2.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah untuk menjelaskan seberapa besar proporsi variabel dependen dijelaskan oleh variasi variabel independen yang dapat dijelaskan di dalam model. Koefisien determinasi juga digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu garis regresi.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjabarkan mengenai hasil penelitian mengenai pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, upah minimum, inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2018. Analisis yang dilakukan dalam penelitian merupakan data *cross section* dan *time series* dari 35 sampel kabupaten/kota yang ada di provinsi Jawa Tengah pada periode 2010-2018. Untuk menganalisis model yang tepat dilakukan dengan tiga metode yaitu *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*. Diantara ketiganya akan dilakukan pengujian yang nantinya akan dipilih model yang paling tepat untuk digunakan di tahap uji statistik. Estimasi yang digunakan dalam pengujian ini adalah dengan menggunakan program EVIEWS 9.

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut adalah Produk Domestik Regional Bruto, upah minimum, inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia.

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

Kab/Kota	Variabel	TK (jiwa)	PDRB (juta rupiah)	UMK (rupiah)	INFLASI (persen)	IPM (peringkat nilai)
Cilacap	Mean	727681	85780596,95	1192322	5,26	67,06
	Max	788414	98172612,56	1841209	8,37	69,56
	Min	678601	75099089,89	698333,33	2,63	64,18
Banyumas	Mean	736913	29719584,45	1065877,78	4,62	69,18
	Max	827086	37414500,58	1589000	8,5	71,3
	Min	693340	23016943,39	670000	2,42	66,87
Purbalingga	Mean	442211,2	13518373,15	1094977,78	5,09	66,14
	Max	463809	16458708,49	1655200	9,57	68,41
	Min	418945	10858631,52	695000	1,62	63,61
Banjarnegara	Mean	469107,8	11759822,51	1016611,11	5,01	63,69
	Max	496975	14438149,74	1490000	8,35	66,54
	Min	452617	9439359,002	662000	2,87	60,7
Kebumen	Mean	583625,1	15354384,68	1053722,22	5,25	65,94
	Max	625449	18773833,5	1560000	10,46	68,8
	Min	537808	12311421,83	700000	2,71	63,08
Purworejo	Mean	349322	10453106,9	1058333,33	4,71	70,09
	Max	359116	12668117,97	1573000	8,48	71,87
	Min	330680	8513490,56	719000	2,52	68,16
Wonosobo	Mean	396716,2	10921251,4	1079900	4,69	65,12
	Max	409984	13017627,75	1585000	8,82	67,81
	Min	366899	9005925,539	715000	2,66	62,5
Magelang	Mean	636692,7	18052627,75	1166166,67	4,70	66,32
	Max	704651	22074995,9	1742000	8,34	69,11
	Min	600840	14363230,57	752000	2,59	63,28
Boyolali	Mean	515967,7	17340575,35	1129748,78	4,48	70,82
	Max	537179	21407484,05	1651650	8,21	73,22
	Min	484207	13721701,47	748000	2,19	68,76
Klaten	Mean	591243,3	21499748,6	1107917,15	4,37	72,90
	Max	611156	26381363,13	1661632,35	7,92	74,79
	Min	548672	17002049,66	735000	1,67	70,76
Sukoharjo	Mean	427168	20673874,71	1137222,22	4,51	73,88
	Max	458859	25570865,09	1648000	8,42	76,07

Kab/Kota	Variabel	TK (jiwa)	PDRB (juta rupiah)	UMK (rupiah)	INFLASI (persen)	IPM (peringkat nilai)
	Min	400526	16357221,65	769500	2,31	71,53
Wonogiri	Mean	515035,8	16291036,32	1035666,67	4,32	66,84
	Max	563887	19839038,83	1542000	8,6	69,37
	Min	484680	13310571,1	695000	2,13	63,9
Karanganyar	Mean	441347,2	20438008,96	1140777,78	4,43	73,41
	Max	466799	25150277,73	1696000	8,7	75,54
	Min	424485	16393788,72	761000	1,93	70,31
Sragen	Mean	457983,1	20358385,59	1054675,36	4,516	70,34
	Max	471613	25355124,94	1546492,72	8,51	72,96
	Min	435506	15832557,66	724000	2,49	67,67
Grobogan	Mean	701854,1	15369641,8	1049388,89	4,71	67,37
	Max	724515	18702306,35	1560000	8,03	69,32
	Min	684286	12766021,74	687500	1,86	64,56
Blora	Mean	446039,4	13230524,08	1096144,44	4,31	65,68
	Max	473665	17607942,16	1564000	7,94	67,95
	Min	427038	10149079,63	742000	2,14	63,02
Rembang	Mean	316362,9	10421235,07	1057733,333	4,26	67,26
	Max	335518	12855231,29	1535000,0	7,59	69,46
	Min	304638	8373546,874	702000	1,75	64,53
Pati	Mean	603036	23683034,86	1085853	4,44	67,64
	Max	627565	29194706,71	1585000	8,01	70,71
	Min	565452	18782546,64	733000	2,3	65,13
Kudus	Mean	426332,8	62185623,18	1251733,33	5,06	71,93
	Max	462646	71048114,17	1892500	8,59	74,58
	Min	394361	52933496,31	775000	2,32	69,22
Jepara	Mean	575280,4	16521147	1108262,22	5,25	69,33
	Max	617552	20169685,17	1739360	9,87	71,38
	Min	536754	13347321,26	702000	2,83	66,76
Demak	Mean	524134,6	14329763,71	1341653	4,75	68,81
	Max	564864	17474052	2065490	8,69	71,26
	Min	492570	11647735,65	813400	2,27	66,02
Semarang	Mean	545651	27416563,95	1286533,33	4,82	71,65
	Max	596297	33857648,85	1900000	8,63	73,61
	Min	502705	21572136,87	824000	2,39	69,58

Kab/Kota	Variabel	TK (jiwa)	PDRB (juta rupiah)	UMK (rupiah)	INFLASI (persen)	IPM (peringkat nilai)
Temanggung	Mean	412260,7	11970240,76	1091555,56	4,50	66,16
	Max	423256	14452019,21	1557000	7,81	68,83
	Min	394163	9710199,268	709500	2,42	63,08
Kendal	Mean	454299	23731462,45	1267025	4,54	68,75
	Max	470254	29186390,49	1929458	8,34	71,28
	Min	435045	18798278,37	780000	2,16	66,23
Batang	Mean	364665,9	11794550,71	1181822,22	4,46	64,67
	Max	389471	14448522,77	1749900	8,08	67,86
	Min	353214	9447328,384	745000	2,24	61,64
Pekalongan	Mean	412726,1	12718745,15	1176592,78	4,65	66,61
	Max	441686	15524820,69	1721637,55	8,32	68,97
	Min	390027	10254315,35	760000	2,65	63,75
Pemalang	Mean	565730,67	14050167,88	1081488,89	4,51	62,42
	Max	593820	17286696,64	1588000	7,38	65,67
	Min	515127	11282196,1	675000	2,33	58,64
Tegal	Mean	597814,1	19128528,25	1076555,56	4,71	64,23
	Max	645162	23552548,37	1617000	8,48	67,33
	Min	569566	15106509,91	687000	2,67	61,14
Brebes	Mean	786144,9	25350085,32	1052072,22	4,78	62,56
	Max	847055	31094896,54	1542000	9,83	65,68
	Min	711917	20158107,77	681000	2,84	59,49
Magelang	Mean	58427,8	5025902,45	1113655,56	4,53	76,03
	Max	63151	6145869,75	1580000	7,92	78,31
	Min	53719	4010718,179	745000	2,25	73,99
Surakarta	Mean	258502,9	27186536,66	1162643	4,23	79,48
	Max	271199	33506170,4	1668700	8,32	81,46
	Min	235998	21469551,3	785000	1,93	77,45
Salatiga	Mean	88158,1	7408816,871	1250153,10	4,43	80,19
	Max	103982	9104841	1735930,06	7,84	82,41
	Min	73329	5845475,807	803185	2,19	78,35
Semarang	Mean	818937,9	104137988,6	1451851,83	4,27	79,63
	Max	899796	131137259,7	2310087,5	8,53	82,72
	Min	724687	80824099,97	939756	0,41	76,96
Pekalongan	Mean	141149,3	5785605,326	1172158,74	4,55	71,65

Kab/Kota	Variabel	TK (jiwa)	PDRB (juta rupiah)	UMK (rupiah)	INFLASI (persen)	IPM (peringkat nilai)
	Max	151597	7087915,58	1765178,63	7,82	74,24
	Min	131982	4624260,081	760000	2,45	68,95
Tegal	Mean	110005,7	8607604,989	1103542,12	4,08	72,06
	Max	117091	10599407,23	1630500	7,4	74,44
	Min	102271	6895713,334	700000	0,4	69,33

Sumber: Hasil olah data sekunder, 2019

Dari tabel di atas dengan jumlah observasi di 35 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan bahwa dalam penelitian diperoleh rata-rata penyerapan tenaga adalah sebanyak 471.387 jiwa. Kota Semarang dengan jumlah penyerapan tenaga kerja tertinggi yaitu sebesar 899.796 jiwa, hal ini dikarenakan kota Semarang memiliki banyak usaha lokal yang bergerak di sektor UMKM yang terus tumbuh dengan pesat. Wilayah kota Magelang adalah dengan angka penyerapan tenaga kerja terendah yaitu sebesar 53.719 jiwa, Magelang merupakan wilayah yang masih mengandalkan sektor pertanian yang merupakan lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak, namun penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian terus mengalami penurunan setiap tahunnya.

Kota Semarang adalah kota dengan angka PDRB tertinggi di Jawa Tengah yaitu sebesar Rp.131.137.260 juta rupiah, hal ini karena sektor utama pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang adalah industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi. Kota Semarang juga terus meningkatkan potensi pariwisata, seperti pembangunan kampung-kampung tematik menampilkan ciri khas Semarang. PDRB terendah dihasilkan oleh kabupaten Banjarnegara yaitu sebesar Rp.4.010.718

juta rupiah, Banjarnegara saat ini masih terus berupaya dalam membangun infrastruktur yang diharapkan mampu untuk meningkatkan sektor ekonomi masyarakat yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Upah minimum Kabupaten/Kota tertinggi di Jawa Tengah adalah sebesar Rp.2.310.088 di wilayah kota Semarang dan upah minimum kabupaten/kota terendah di wilayah kabupaten Banjarnegara Rp.662.000. Besaran upah minimum yang ditetapkan pemerintah berdasarkan pertumbuhan ekonomi, apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka UMK yang ditetapkan juga meningkat. Kemudian inflasi pada wilayah kabupaten Kebumen menjadi kabupaten dengan inflasi tertinggi yaitu sebesar 10,46%, terjadinya peningkatan inflasi di karenakan naiknya harga barang dan jasa terutama pada produk bahan makanan dan makanan jadi. Inflasi terendah sebesar 0,4% di kota Semarang yang merupakan dampak dari kebijakan pemerintah setempat melakukan upaya reformasi struktur konsentrasi ekonomi Kota Semarang yang semula dominan di sektor Industri menjadi lebih berkonsentrasi pada sektor Perdagangan dan Jasa. Sehingga perekonomian Kota Semarang menjadi lebih stabil.

Kota dengan IPM tertinggi berada di kota Semarang sebesar 82,72 dan Indeks Pembangunan Manusia terendah yaitu sebesar 58,64 terjadi di kabupaten Pemalang. Pemerintah Kota Semarang peduli dengan kesehatan dan pendidikan yang merupakan komponen utama yang harus dikembangkan untuk langkah pembangunan yang mendasar. Pemerintah telah meluncurkan program berobat gratis bagi seluruh masyarakat dan pemerintah juga banyak memberikan pelatihan-pelatihan kepada anak

muda yang dapat menunjang pembangunan dengan berbagai fasilitas sarana prasarana pendukung. Anak muda tersebut banyak menyalurkan ide kreatif, tenaga, hingga berwirausaha menggarap potensi Kota Semarang.

4.2 Hasil dan Analisis

4.2.1 Pemilihan Model

4.2.1.1 Uji Chow

Common Effect Model ataukah *Fixed Effect Model* yang akan digunakan maka perlu dilakukan pengujian *uji Chow*.

- H0: Model yang digunakan *Common Effect Model*
- H1: Model yang digunakan *Fixed Effect Model*

Dengan asumsi:

Apabila $p\text{-value} > \alpha$ (5%), maka H0 diterima dan

Apabila $p\text{-value} < \alpha$ (5%), maka H0 ditolak

Tabel 4.2 Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross Section F	610.109387	(34,276)	0.0000
Cross section Chi-Square	1364.836857	34	0.0000

Sumber: Hasil olah data Eviews 9, 2019

Dari hasil pengujian *uji Chow* di atas yang menunjukkan nilai probabilitas chi square sebesar $0.0000 < \alpha$ (0,05) maka H0 ditolak, artinya model yang tepat untuk digunakan adalah *Fixed Effect Model*.

4.2.1.2 Uji Hausman

Dari hasil pengujian di atas maka uji harus dilanjutkan untuk menentukan apakah menggunakan model *fixed effect* ataukah *random effect* dengan menggunakan uji *Hausmant test*.

- H0: Model yang digunakan *Random Effect Model*
- H1: Model yang digunakan *Fixed Effect Model*

Dengan asumsi:

Apabila $p\text{-value} > \alpha$ (5%), maka H0 diterima

Apabila $p\text{-value} < \alpha$ (5%), maka H0 ditolak

Tabel 4.3 Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f	Prob.
Cross section random	38.980293	4	0.0000

Sumber: Hasil olah data Eviews 9, 2019

Berdasarkan hasil pengujian *uji Hausman* diperoleh nilai probabilitas cross section random sebesar 0.0000 lebih kecil dari α (0,05) maka H0 ditolak, artinya model yang tepat adalah menggunakan *Fixed Effect Model*.

4.2.2 Model Regresi Panel Fixed Effect

Berdasarkan kedua uji yang telah dilakukan di atas yaitu uji *Chow test* dan uji *Hausman test*, *Fixed Effect Model* adalah model yang paling tepat untuk digunakan dalam menganalisis penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah.

Tabel 4.4 Model Fixed Effect

Dependent Variable: LOG(Y)
 Method: Panel Least Squares
 Date: 11/29/19 Time: 10:38
 Sample: 2010 2018
 Periods included: 9
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 315

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.410906	0.790733	11.90150	0.0000
LOG(X1)	0.211969	0.074086	2.861120	0.0045
LOG(X2)	0.024275	0.033694	0.720452	0.4719
X3	0.002083	0.001023	2.036955	0.0426
X4	-0.005112	0.005572	-0.917482	0.3597

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.996750	Mean dependent var	12.93408
Adjusted R-squared	0.996303	S.D. dependent var	0.599829
S.E. of regression	0.036471	Akaike info criterion	-3.669140
Sum squared resid	0.367121	Schwarz criterion	-3.204536
Log likelihood	616.8895	Hannan-Quinn criter.	-3.483513
F-statistic	2227.852	Durbin-Watson stat	1.489402
Prob(F-statistic)	0.000000		

Model regresi berganda fixed effect pada penyerapan tenaga kerja:

$$\ln TK_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

$$\ln TK = 9.410906 + 0.211969 \ln X_1 + 0.024275 \ln X_2 + 0.002083 X_3 - 0.005112 X_4 + e_{it}$$

Keterangan:

TK = Tenaga Kerja

X1 = Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rupiah)

X2 = Upah Minimum Kabupaten/Kota (Rupiah)

X3 = Inflasi (Persen)

X4 = Indeks Pembangunan Manusia (Peringkat Nilai)

4.2.3 Pengujian Hipotesis

4.2.3.1 Hasil Uji t

Uji t merupakan uji hipotesis yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat adanya pengaruh dari variabel PDRB, upah minimum, inflasi dan IPM secara parsial terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah. Dengan membandingkan nilai probabilitas dengan alpha 0.05 maka dapat kita ketahui apakah terdapat adanya pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen melihat hipotesis uji t.

1. Pengaruh PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Dari hasil regresi di atas pada *Fixed Effect Model*, PDRB mempunyai nilai koefisien 0.211969 dan probabilitasnya sebesar 0.0045. Dimana nilai probabilitas lebih kecil dari alpha 0.05 maka H0 ditolak, artinya secara parsial variabel PDRB mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja

2. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil perhitungan di atas upah minimum Kabupaten/Kota mempunyai nilai koefisien 0.024275 dan probabilitasnya sebesar 0.4719. Dimana nilai probabilitas lebih besar dari alpha 0.05 maka H0 tidak ditolak, artinya secara parsial

variabel upah minimum Kabupaten/Kota tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

3. Pengaruh Inflasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil perhitungan di atas inflasi mempunyai nilai koefisien 0.002083 dan probabilitasnya sebesar 0.0426. Dimana nilai probabilitas lebih kecil dari α (0,05) maka H_0 ditolak, artinya secara parsial variabel inflasi mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

4. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil perhitungan di atas IPM mempunyai nilai koefisien - 0.005112 dan probabilitasnya sebesar 0.3597. Dimana nilai probabilitas lebih kecil dari α (0,05) maka H_0 tidak ditolak artinya secara parsial variabel IPM tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

4.2.3.2 Hasil Uji F

Hasil uji F adalah uji yang menunjukkan apakah terdapat pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Uji F memiliki tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari variabel PDRB, upah minimum Kabupaten/Kota, inflasi dan IPM secara bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Membandingkan probabilitas F dengan nilai α (0,05) dapat diketahui ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.5 Hasil Uji F

Variabel	Probabilitas F
PDRB	0.000000
Upah Minimum	
Inflasi	
IPM	

Dari perhitungan model *fixed effect*, diperoleh nilai probabilitas F sebesar $0.000000 < \alpha (0,05)$ maka H_0 ditolak yang artinya variabel independen secara menyeluruh mempengaruhi variabel dependen. Sehingga PDRB, upah minimum Kabupaten/Kota, inflasi dan IPM secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

4.2.3.3 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel Model *Fixed Effect* di atas dapat diinterpretasikan mengenai besarnya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.996303 yang artinya secara bersama -sama PDRB, upah minimum Kabupaten/Kota, inflasi dan IPM memberikan pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah sebesar 99,6%. Sedangkan sisanya 0,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

4.3 Analisis antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Dengan menggunakan Eviews 9 untuk mengolah data pada tabel di bawah, maka dapat dijelaskan bahwa pada setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah terdapat adanya perbedaan nilai intersep. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.6 di bawah:

Tabel 4.6 Koefisien antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

kabupaten/Kota	CROSS ID	KOEFISIEN C	INTERSEP
Cilacap	0.20824	9.410906	9.619145
Banyumas	0.46109	9.410906	9.871991
Purbalingga	0.10052	9.410906	9.511426
Banjarnegara	0.17873	9.410906	9.589639
Kebumen	0.3501	9.410906	9.761007
Purworejo	-0.059	9.410906	9.351869
Wonosobo	0.03252	9.410906	9.443428
Magelang	0.40324	9.410906	9.814147
Boyolali	0.22661	9.410906	9.637516
Klaten	0.32863	9.410906	9.739539
Sukoharjo	0.01552	9.410906	9.426424
Wonogiri	0.21951	9.410906	9.630418
Karanganyar	0.04861	9.410906	9.459515
Sragen	0.07293	9.410906	9.483837
Grobogan	0.54338	9.410906	9.954288
Blora	0.11499	9.410906	9.525896
Rembang	-0.171	9.410906	9.239922
Pati	0.30101	9.410906	9.711917
Kudus	-0.2345	9.410906	9.176431
Jepara	0.33654	9.410906	9.747447
Demak	0.26751	9.410906	9.678412
Semarang	0.18511	9.410906	9.596015
Temanggung	0.05736	9.410906	9.468265
Kendal	0.01972	9.410906	9.430624
Batang	-0.0712	9.410906	9.339741
Pekalongan	0.04557	9.410906	9.456477
Pemalang	0.32081	9.410906	9.731717
Tegal	0.31989	9.410906	9.7308
Brebes	0.52514	9.410906	9.936044
Magelang	-1.6629	9.410906	7.748044
Surakarta	-0.5163	9.410906	8.894621
Salatiga	-1.319	9.410906	8.091954
Semarang	0.34771	9.410906	9.758619
Pekalongan	-0.8342	9.410906	8.576694
Tegal	-1.163	9.410906	8.247883

Sumber: Hasil olah data sekunder, 2019

Dari hasil regresi data panel di atas terdapat adanya perbedaan kondisi di masing-masing kabupaten dalam penyerapan tenaga kerja. Tingkat penyerapan tenaga kerja tertinggi ada di kabupaten Brebes dengan nilai cross id sebesar 0.52514 dan nilai koefisien C sebesar 9.410906 maka intersep Kabupaten Brebes sebesar 9.936044. Nilai intersep sebesar 9.936044 yang artinya apabila nilai PDRB, Upah Minimum, Inflasi dan IPM bernilai konstan maka jumlah tenaga kerja yang terserap di Kabupaten Brebes sebesar 9.936044 jiwa. Sedangkan tingkat penyerapan tenaga kerja terendah ada di kabupaten Magelang sebesar 7.748044. Kabupaten Brebes menjadi salah satu kabupaten yang mempunyai penyerapan tenaga kerja tertinggi di Jawa Tengah karena mempunyai sektor yang dominan yaitu pada sektor pertanian. Sekitar 70% masyarakat bekerja pada sektor pertanian yang menyumbang 53% PDRB kabupaten Brebes (Wikipedia,2019). Saat ini kabupaten Brebes telah disipakan untuk menjadi daerah industri sehingga hal ini akan membuka banyak peluang kerja.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Analisis Pengaruh PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Hasil dari pengujian model *fixed effect model* dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto secara parsial mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dengan nilai koefisien 0.211969. Hal ini menunjukkan bahwa apabila PDRB naik 1% akan meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja sebesar 0,2%. Produksi perusahaan yang meningkat akan meningkatkan jumlah permintaan tenaga kerja, dimana

peningkatan PDRB berbanding dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang terus mengalami perubahan peningkatan menunjukkan kemakmuran masyarakat yang juga meningkat. Sehingga akan menyebabkan banyaknya lowongan pekerjaan yang tersedia dan berdampak akan mengurangi pengangguran. Dalam hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Wasilaputri (2016) dimana menyimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Peningkatan nilai PDRB menandakan bahwa jumlah nilai tambah output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi disuatu wilayah juga meningkat maka akan mendorong perusahaan untuk menambah permintaan tenaga kerja agar produksinya dapat ditingkatkan.

4.4.2 Analisis Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil pengujian model *fixed effect model* dapat disimpulkan bahwa upah minimum Kabupaten/Kota secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dengan nilai koefisien 0.024275. Hal ini menunjukkan bahwa upah minimum tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Hipotesis penelitian tersebut tidak dapat diterima atau tidak terbukti.

Pemberlakuan upah yang minimum dapat menyebabkan pengangguran, upah yang tinggi akan mendorong produsen mengurangi jumlah tenaga kerja, namun dalam beberapa kasus pada kenyataannya dapat menyebabkan perusahaan yang bersangkutan

meningkatkan masukan tenaga kerja yang memaksimalkan laba. Nicholson (dalam Akmal, 2010).

Dalam penelitian ini upah minimum Kabupaten/Kota tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja yang memiliki makna bahwa apabila terjadi kenaikan atau penurunan upah maka perusahaan tetap akan mempekerjakan tenaga kerja. Selain itu upah minimum yang ditetapkan pemerintah tidak mempengaruhi keputusan penyedia lapangan pekerjaan untuk menambah/merekrut tenaga kerja, sehingga upah minimum tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Ziyadaturroh dkk (2018) yang menyatakan bahwa masih terdapat adanya masalah dalam pengupahan sehingga tidak meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan produksi, sehingga upah minimum provinsi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

4.4.3 Analisis Pengaruh Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Dari pengujian *fixed effect model* menunjukkan bahwa inflasi secara parsial mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dengan nilai koefisien 0.002083. Hal ini menunjukkan bahwa apabila inflasi naik 1% akan meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja sebesar 0,002%. Dalam hal ini yang berarti bahwa apabila terjadi kenaikan inflasi maka akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi Jawa Tengah.

Pada dasarnya kenaikan inflasi akan menyebabkan seluruh biaya produksi menjadi lebih mahal sehingga menyebabkan harga barang menjadi meningkat. Sementara pada saat terjadi inflasi yang tinggi daya beli masyarakat semakin menurun, perusahaan akan mengurangi jumlah biaya produksi dengan mengurangi faktor produksi tenaga kerja dengan menggantinya ke faktor produksi lain seperti teknologi.

Namun pada kondisi berlainan seperti pada saat terjadinya kenaikan inflasi yang masih ringan perusahaan masih akan menambah jumlah output karena naiknya harga masih bisa dijangkau oleh produsen. Penambahan jumlah output yang dihasilkan pasti akan diikuti dengan penambahan faktor produksi seperti tenaga kerja sehingga terjadinya peningkatan penyerapan tenaga kerja (Indradewa & Natha, 2015). Hal ini ditunjukkan pada data dalam penelitian bahwa nilai inflasi tertinggi di Provinsi Jawa Tengah masih dalam intensitas ringan yaitu sebesar 10.4%. Sehingga kenaikan inflasi masih berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

4.4.4 Analisis Pengaruh IPM Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan pengujian *fixed effect model* menunjukkan bahwa IPM secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dengan nilai koefisien -0.005112. Hal ini menunjukkan bahwa IPM tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

Sumber daya manusia yang memiliki IPM yang tinggi belum tentu menjamin terserapnya tenaga kerja secara maksimal. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan kualifikasi yang ditetapkan oleh penyedia lapangan pekerjaan dalam merekrut tenaga

kerja, sehingga masih banyak terdapat tenaga kerja yang tersedia tidak dapat mengisi kesempatan yang ada. Harfina (dalam Akmal, 2010).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pengaruh dari variabel independen yang meliputi; Produk Domestik Regional Bruto, upah minimum Kabupaten/Kota, inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2018 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah secara simultan dipengaruhi oleh variabel Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum, Inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia.
2. Produk Domestik Regional Bruto secara parsial mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan PDRB yang menandakan bahwa jumlah nilai tambah output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi disuatu wilayah juga meningkat sehingga mendorong perusahaan untuk menambah permintaan tenaga kerja.
3. Upah minimum Kabupaten/Kota secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa upah yang ditetapkan oleh pemerintah tidak mempengaruhi keputusan penyedia lapangan pekerjaan untuk menambah/merekrut tenaga kerja.

4. Inflasi secara parsial mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat inflasi tertinggi di Jawa Tengah masih dalam intensitas ringan dan perusahaan masih akan menambah jumlah output karena naiknya harga masih bisa dijangkau. Sehingga kenaikan inflasi masih berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.
5. Indeks Pembangunan Manusia secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan kualifikasi yang ditetapkan oleh penyedia lapangan pekerjaan dalam merekrut tenaga kerja sehingga masih banyak tenaga kerja yang tidak dapat mengisi kesempatan kerja.
6. Dari 35 observasi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2018, penyerapan tenaga kerja tertinggi berada di kota Semarang dan yang terendah di kota Magelang. Kota Semarang adalah kota dengan PDRB tertinggi di Jawa Tengah dan Banjarnegara dengan angka PDRB yang terendah. Selain itu Upah Minimum tertinggi dan terendah juga ada di wilayah kota Semarang dan terendah di Banjarnegara. Indeks Pembangunan Manusia tertinggi juga berada di wilayah Semarang dan terendah di kabupaten Pematang.

5.2 Implikasi

1. Untuk mengurangi pengangguran yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah dapat dilakukan dengan meningkatkan PDRB di sektor industri pengolahan terutama UKM yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak.
2. Kabupaten dan Kota yang berada Provinsi Jawa Tengah masih mempunyai peluang untuk meningkatkan besaran upah minimum Kabupaten/Kota. Hal ini didasarkan tidak berpengaruhnya perubahan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja.
3. Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah harus mengendalikan Inflasi dengan baik agar harga-harga yang ada tidak membebani perusahaan dalam aktivitas produksi.
4. Dalam upaya meningkatkan IPM perlu ditindaklanjuti dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya diluar parameter IPM tersebut dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang kreativitas masyarakat.
5. Dalam rangka meningkatkan penyerapan tenaga kerja di wilayah Kabupaten/Kota Jawa Tengah dapat dilakukan dengan meningkatkan PDRB, meningkatkan Upah Minimum Kabupaten/Kota, meningkatkan IPM dan mengendalikan inflasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, R. (2010). “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia”, Skripsi Sarjana. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
- Badan Pusat Statistik (2015). “Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin 1993-2018”. Diambil 29 November 2019, dari <https://jateng.bps.go.id/dynamictable/2015/08/03/2/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin-1993---2018.html>
- Badan Pusat Statistik (2016). “ Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah 2009-2018”. Diambil 25 November 2019, dari <https://jateng.bps.go.id/dynamictable/2016/12/14/32/angkatan-kerja-di-provinsi-jawa-tengah-2009-2018.html>
- Badan Pusat Statistik (2017). “ PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Juta Rupiah) 2010 – 2018”. Diambil 25 November 2019, dari <https://jateng.bps.go.id/statictable/2017/02/13/1411/-seri-2010-pdrb-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah-juta-rupiah-2010---2018.html>
- Badan Pusat Statistik (2016). “Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota 2010-2018”. Diambil 25 November 2019, dari <https://jateng.bps.go.id/dynamictable/2016/10/17/25/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-jawa-tengah-menurut-kabupaten-kota-2010-2018.html>
- Badan Pusat Statistik (2016). “Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota 2008-2017”. Diambil 25 November 2019, dari <https://jateng.bps.go.id/dynamictable/2016/12/16/41/indeks-harga-konsumen-dan-inflasi-jawa-tengah-menurut-kabupaten-kota-2008-2017.html>
- Badan Pusat Statistik (2017). “Kebutuhan Hidup Layak dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2000 - 2019 (Rupiah)”. Diambil 25 November 2019, dari <https://jateng.bps.go.id/statictable/2017/02/27/1454/kebutuhan-hidup-layak-dan-upah-minimum-kabupaten-kota-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah-tahun-2000---2018-rupiah-.html>

- Boediono. (2000). *Ekonomi Moneter Edisi ke-3*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Intradewa, I. G., & Natha, K. S. (2015). "Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali". *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 923-950., dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/14385>
- Kementerian Perindustrian (2017). *Majalah Media Industri.*, dari <https://kemenperin.go.id/majalah/8/media-industri>
- kompasiana (2019). " Pentingnya Kewirausahaan untuk Membuka Lapangan Kerja Baru"., dari <https://www.kompasiana.com/>
- Lincoln, A. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Mankiw, N. G., Quah, E., & Wilson, P. (2013). *Pengantar Ekonomi Makro ed. Asia Vol 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi, S. (2003). *Ekonomi Sumberdaya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nanga, M. (2005). *Makro Ekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pangastuti, Y. (2015). "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Tengah". berasal. *Economics Development Analysis Journal Universitas Negeri Semarang*. 203-211., dari <https://journal.unnes.ac.id>
- Sasana, H. (2006). Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Pembangunan*, 145-170.
- Simanjuntak, P. (2001). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: LPFE UI.
- Siregar, T (Sekjen OPSI), (2014). " Menaker Baru Harus Carikan Solusi soal PHK di Industri Rokok"., dari <https://www.tribunnews.com/bisnis>
- Sudarsono. (1988). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Karunia.
- Sukirno, S. (2001). *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sulistiawati, R. (2012). "Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia". *jurnal EKSOS Universitas Tanjungpura Pontianak*, Volume 8, Nomor 3, 195 - 211., dari

http://riset.polnep.ac.id/bo/upload/penelitian/penerbitan_jurnal/08-eksos%206%20rini%20okt12.pdf

- Sumarsono, S. (2003). *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan* . Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sumarsono, S. (2009). *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumberdaya Manusia* . Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wasilaputri, F. R. (2016). "Pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDRB, dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2010-2014". *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, Volume 3, No.5, 243–250., dari <http://journal.student.uny.ac.id>
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews Edisi ke-4* . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wihastuti, L. & Rahmatullah, H (2018). " Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa” berasal. *Jurnal Gama Societa UGM*, Vol. 1 No. 1, 96 - 102., dari <https://journal.ugm.ac.id>
- Ziyadaturrofiqoh. dkk. (2018). “Pengaruh PDRB, Upah Minimum Provinsi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jambi” *Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*. Volume 7, No. 1, 13-22., dari <https://online-journal.unja.ac.id>

LAMPIRAN

Lampiran I

Data Penelitian

Kab/Kota	Tahun	TK (Jiwa)	PDRB (Juta Rupiah)	UMK (Rupiah)	Inflasi (%)	IPM (Peringkat Nilai)
Cilacap	2010	688.049	75.099.089,89	698.333	5,65	64,18
Cilacap	2011	678.601	78.156.818,82	718.667	5,27	64,73
Cilacap	2012	730.839	79.702.237,61	773.000	6,87	65,72
Cilacap	2013	755.739	81.022.670,26	986.000	8,37	66,8
Cilacap	2014	736.247	83.391.500,18	1.125.000	8,19	67,25
Cilacap	2015	715.819	88.357.606,68	1.287.000	2,63	67,77
Cilacap	2016	715.819	92.858.649,84	1.608.000	2,77	68,6
Cilacap	2017	788.414	95.264.186,69	1.693.689	4,41	68,9
Cilacap	2018	739.602	98.172.612,56	1.841.209	3,21	69,56
Banyumas	2010	733.609	23.016.943,39	670.000	6,04	66,87
Banyumas	2011	706.728	24.538.595,63	750.000	3,4	67,45
Banyumas	2012	731.435	25.982.158,22	795.000	4,73	68,06
Banyumas	2013	723.517	27.793.138,47	877.500	8,5	68,55
Banyumas	2014	737.931	29.367.687,40	1.000.000	7,09	69,25
Banyumas	2015	693.340	31.164.876,40	1.100.000	2,52	69,89
Banyumas	2016	693.340	33.051.046,65	1.350.000	2,42	70,49
Banyumas	2017	785.231	35.147.313,30	1.461.400	3,91	70,75
Banyumas	2018	827.086	37.414.500,58	1.589.000	2,98	71,3

Kab/Kota	Tahun	TK (Jiwa)	PDRB (Juta Rupiah)	UMK (Rupiah)	Inflasi (%)	IPM (Peringkat Nilai)
Purbalingga	2010	418.945	10.858.631,52	695.000	7,82	63,61
Purbalingga	2011	431.974	11.474.221,22	765.000	4,47	64,33
Purbalingga	2012	460.165	12.138.445,34	818.500	4,09	64,94
Purbalingga	2013	446.831	12.778.311,23	896.500	9,57	65,53
Purbalingga	2014	440.065	13.397.712,78	1.023.000	9,08	66,23
Purbalingga	2015	430.097	14.130.612,26	1.101.600	1,62	67,03
Purbalingga	2016	430.097	14.816.429,63	1.377.500	2,39	67,48
Purbalingga	2017	463.809	15.612.285,90	1.522.500	3,72	67,72
Purbalingga	2018	457.918	16.458.708,49	1.655.200	3,01	68,41
Banjarnegara	2010	452.617	9.439.359,00	662.000	7,13	60,7
Banjarnegara	2011	458.548	9.952.403,66	730.000	4,73	61,58
Banjarnegara	2012	496.975	10.473.363,43	765.000	4,55	62,29
Banjarnegara	2013	463.016	11.043.083,01	835.000	8,35	62,84
Banjarnegara	2014	480.123	11.629.845,85	920.000	7,78	63,15
Banjarnegara	2015	464.044	12.266.046,35	1.112.500	2,97	64,73
Banjarnegara	2016	464.044	12.932.884,85	1.265.000	2,87	65,52
Banjarnegara	2017	464.432	13.663.266,65	1.370.000	3,67	65,86
Banjarnegara	2018	478.171	14.438.149,74	1.490.000	3,04	66,54
Kebumen	2010	537.808	12.311.421,83	700.000	8,36	63,08
Kebumen	2011	582.598	13.068.985,50	727.500	4,52	64,05
Kebumen	2012	618.687	13.707.057,24	770.000	4,64	64,47

Kab/Kota	Tahun	TK (Jiwa)	PDRB (Juta Rupiah)	UMK (Rupiah)	Inflasi (%)	IPM (Peringkat Nilai)
Kebumen	2013	592.723	14.333.333,50	835.000	10,46	64,86
Kebumen	2014	625.449	15.163.091,84	975.000	7,36	65,67
Kebumen	2015	590.568	16.115.554,01	1.157.500	2,91	66,87
Kebumen	2016	590.568	16.923.719,54	1.324.600	2,71	67,41
Kebumen	2017	560.548	17.792.465,13	1.433.900	3,25	68,29
Kebumen	2018	553.677	18.773.833,50	1.560.000	3,01	68,8
Purworejo	2010	341.033	8.513.490,56	719.000	7,56	68,16
Purworejo	2011	330.680	8.993.814,30	755.000	2,52	69,11
Purworejo	2012	349.748	9.406.242,93	809.000	3,66	69,4
Purworejo	2013	359.116	9.870.969,95	849.000	7,14	69,77
Purworejo	2014	349.819	10.312.937,79	910.000	8,48	70,12
Purworejo	2015	359.040	10.862.645,98	1.165.000	3,45	70,37
Purworejo	2016	359.040	11.421.552,22	1.300.000	2,66	70,66
Purworejo	2017	342.433	12.028.190,37	1.445.000	4,29	71,31
Purworejo	2018	352.989	12.668.117,97	1.573.000	2,59	71,87
Wonosobo	2010	381.326	9.005.925,54	715.000	6,06	62,5
Wonosobo	2011	391.068	9.489.550,46	775.000	2,66	63,07
Wonosobo	2012	400.856	9.935.905,32	825.000	3,84	64,18
Wonosobo	2013	366.899	10.333.757,05	880.000	8,82	64,57
Wonosobo	2014	397.002	10.828.168,68	990.000	8,44	65,2
Wonosobo	2015	409.389	11.334.080,04	1.166.000	2,71	65,7

Kab/Kota	Tahun	TK (Jiwa)	PDRB (Juta Rupiah)	UMK (Rupiah)	Inflasi (%)	IPM (Peringkat Nilai)
Wonosobo	2016	409.389	11.941.198,92	1.326.000	2,97	66,19
Wonosobo	2017	404.533	12.405.048,84	1.457.100	3,21	66,89
Wonosobo	2018	409.984	13.017.627,75	1.585.000	3,52	67,81
Magelang	2010	629.239	14.363.230,57	752.000	8,25	63,28
Magelang	2011	600.840	15.323.039,48	802.500	2,64	64,16
Magelang	2012	645.033	16.071.142,55	870.000	2,59	64,75
Magelang	2013	605.206	17.020.755,61	942.000	8,34	65,86
Magelang	2014	618.333	17.936.288,38	1.152.000	7,91	66,35
Magelang	2015	623.713	18.864.651,97	1.255.000	3,6	67,13
Magelang	2016	623.713	19.882.244,24	1.410.000	2,86	67,85
Magelang	2017	704.651	20.937.301,01	1.570.000	3,47	68,39
Magelang	2018	679.506	22.074.995,90	1.742.000	2,66	69,11
Boyolali	2010	506.987	13.721.701,47	748.000	7,34	68,76
Boyolali	2011	484.207	14.592.026,26	800.500	3,35	69,14
Boyolali	2012	508.241	15.369.974,36	836.000	3,45	69,51
Boyolali	2013	515.349	16.266.498,68	895.000	8,21	69,81
Boyolali	2014	516.421	17.148.350,76	1.116.000	7,45	70,34
Boyolali	2015	537.179	18.170.383,95	1.197.800	2,58	71,74
Boyolali	2016	537.179	19.139.359,22	1.403.500	2,65	72,18
Boyolali	2017	504.684	20.249.399,44	1.519.289	3,08	72,64
Boyolali	2018	533.462	21.407.484,05	1.651.650	2,19	73,22

Kab/Kota	Tahun	TK (Jiwa)	PDRB (Juta Rupiah)	UMK (Rupiah)	Inflasi (%)	IPM (Peringkat Nilai)
Klaten	2010	548.672	17.002.049,66	735.000	7,9	70,76
Klaten	2011	573.702	18.071.350,51	766.022	1,67	71,16
Klaten	2012	611.156	19.102.402,71	812.000	3,65	71,71
Klaten	2013	610.265	20.241.429,01	871.500	7,92	72,42
Klaten	2014	600.347	21.424.522,36	1.026.600	7,76	73,19
Klaten	2015	596.418	22.558.976,15	1.170.000	2,57	73,81
Klaten	2016	596.418	23.725.740,98	1.400.000	2,31	73,97
Klaten	2017	586.684	24.989.902,87	1.528.500	3,12	74,25
Klaten	2018	597.528	26.381.363,13	1.661.632	2,39	74,79
Sukoharjo	2010	400.526	16.357.221,65	769.500	6,67	71,53
Sukoharjo	2011	410.989	17.319.638,62	790.500	2,63	72,34
Sukoharjo	2012	412.921	18.342.247,26	843.000	4,22	72,81
Sukoharjo	2013	416.179	19.401.889,44	902.000	8,42	73,22
Sukoharjo	2014	436.988	20.449.009,84	1.150.000	7,93	73,76
Sukoharjo	2015	428.885	21.612.078,19	1.223.000	2,69	74,53
Sukoharjo	2016	428.885	22.847.982,81	1.396.000	2,34	75,06
Sukoharjo	2017	450.280	24.163.939,48	1.513.000	3,4	75,56
Sukoharjo	2018	458.859	25.570.865,09	1.648.000	2,31	76,07
Wonogiri	2010	495.295	13.310.571,10	695.000	6,66	63,9
Wonogiri	2011	484.680	13.786.711,34	730.000	3	64,75
Wonogiri	2012	518.846	14.605.088,22	775.000	3,43	65,75

Kab/Kota	Tahun	TK (Jiwa)	PDRB (Juta Rupiah)	UMK (Rupiah)	Inflasi (%)	IPM (Peringkat Nilai)
Wonogiri	2013	514.664	15.303.280,47	830.000	8,6	66,4
Wonogiri	2014	516.294	16.107.795,17	954.000	7,2	66,77
Wonogiri	2015	505.043	16.977.198,56	1.101.000	2,13	67,76
Wonogiri	2016	505.043	17.869.145,42	1.293.000	2,94	68,23
Wonogiri	2017	531.570	18.820.497,77	1.401.000	2,32	68,66
Wonogiri	2018	563.887	19.839.038,83	1.542.000	2,63	69,37
Karanganyar	2010	427.435	16.393.788,72	761.000	7,26	70,31
Karanganyar	2011	424.485	17.205.063,88	801.500	3,31	71
Karanganyar	2012	427.462	18.219.456,66	846.000	3,29	72,26
Karanganyar	2013	435.522	19.256.516,28	896.500	8,7	73,33
Karanganyar	2014	433.767	20.262.444,42	1.060.000	7,38	73,89
Karanganyar	2015	449.689	21.286.287,14	1.226.000	2,4	74,26
Karanganyar	2016	449.689	22.436.293,80	1.420.000	1,93	74,9
Karanganyar	2017	457.277	23.731.952,05	1.560.000	3,15	75,22
Karanganyar	2018	466.799	25.150.277,73	1.696.000	2,48	75,54
Sragen	2010	463.749	15.832.557,66	724.000	6,77	67,67
Sragen	2011	435.506	16.870.231,27	760.000	2,86	68,12
Sragen	2012	471.613	17.902.104,86	810.000	3,74	68,91
Sragen	2013	462.756	19.102.181,74	864.000	7,55	69,95
Sragen	2014	450.618	20.169.824,79	960.000	8,51	70,52
Sragen	2015	464.899	21.390.871,20	1.105.000	3,05	71,1

Kab/Kota	Tahun	TK (Jiwa)	PDRB (Juta Rupiah)	UMK (Rupiah)	Inflasi (%)	IPM (Peringkat Nilai)
Sragen	2016	464.899	22.625.821,66	1.300.000	2,49	71,43
Sragen	2017	466.610	23.976.752,18	1.422.586	3,18	72,4
Sragen	2018	441.198	25.355.124,94	1.546.493	2,49	72,96
Grobogan	2010	688.296	12.766.021,74	687.500	7,45	64,56
Grobogan	2011	697.845	13.172.711,96	735.000	1,86	65,41
Grobogan	2012	710.305	13.842.047,14	785.000	4,48	66,39
Grobogan	2013	684.286	14.474.728,93	842.000	7,88	67,43
Grobogan	2014	719.573	15.064.456,66	935.000	8,03	67,77
Grobogan	2015	685.333	15.962.619,43	1.160.000	3,31	68,05
Grobogan	2016	685.333	16.682.629,70	1.305.000	2,41	68,52
Grobogan	2017	724.515	17.659.254,29	1.435.000	4,05	68,87
Grobogan	2018	721.201	18.702.306,35	1.560.000	2,89	69,32
Blora	2010	441.334	10.149.079,63	742.000	7,17	63,02
Blora	2011	427.235	10.597.723,01	816.200	2,26	63,88
Blora	2012	448.631	11.116.865,91	855.500	3,55	64,7
Blora	2013	454.632	11.712.504,85	932.000	7,94	65,37
Blora	2014	427.038	12.227.201,29	1.009.000	7,13	65,84
Blora	2015	443.275	12.882.587,70	1.180.000	2,85	66,22
Blora	2016	443.275	15.914.663,42	1.328.500	2,14	66,61
Blora	2017	455.270	16.866.148,73	1.438.100	2,98	67,52
Blora	2018	473.665	17.607.942,16	1.564.000	2,78	67,95

Kab/Kota	Tahun	TK (Jiwa)	PDRB (Juta Rupiah)	UMK (Rupiah)	Inflasi (%)	IPM (Peringkat Nilai)
Rembang	2010	304.638	8.373.546,87	702.000	6,61	64,53
Rembang	2011	320.747	8.808.302,78	757.600	2,73	65,36
Rembang	2012	324.204	9.277.163,23	816.000	4,28	66,03
Rembang	2013	320.341	9.780.750,39	896.000	6,88	66,84
Rembang	2014	305.280	10.284.274,36	985.000	7,59	67,4
Rembang	2015	306.110	10.850.269,20	1.120.000	2,66	68,18
Rembang	2016	306.110	11.423.008,30	1.300.000	1,75	68,6
Rembang	2017	335.518	12.138.569,17	1.408.000	3,31	68,95
Rembang	2018	324.318	12.855.231,29	1.535.000	2,53	69,46
Pati	2010	581.998	18.782.546,64	733.000	6,36	65,13
Pati	2011	565.452	19.893.325,24	769.550	2,3	65,71
Pati	2012	574.466	21.072.328,70	837.500	3,92	66,13
Pati	2013	611.905	22.329.693,98	927.600	7,57	66,47
Pati	2014	607.933	23.365.213,99	1.013.027	8,01	66,99
Pati	2015	617.299	24.770.325,07	1.176.500	3,23	68,51
Pati	2016	617.299	26.130.205,34	1.310.000	2,31	69,03
Pati	2017	623.407	27.608.968,08	1.420.500	3,51	70,12
Pati	2018	627.565	29.194.706,71	1.585.000	2,77	70,71
Kudus	2010	394.361	52.933.496,31	775.000	7,65	69,22
Kudus	2011	403.877	55.175.794,89	840.000	3,34	69,89
Kudus	2012	426.422	57.440.810,51	889.000	4,77	70,57

Kab/Kota	Tahun	TK (Jiwa)	PDRB (Juta Rupiah)	UMK (Rupiah)	Inflasi (%)	IPM (Peringkat Nilai)
Kudus	2013	412.764	59.944.556,52	990.000	8,31	71,58
Kudus	2014	426.804	62.600.680,87	1.150.000	8,59	72
Kudus	2015	428.500	65.029.937,50	1.380.000	3,28	72,72
Kudus	2016	428.500	66.679.583,36	1.608.200	2,32	72,94
Kudus	2017	453.121	68.817.634,53	1.740.900	4,17	73,84
Kudus	2018	462.646	71.048.114,17	1.892.500	3,11	74,58
Jepara	2010	536.754	13.347.321,26	702.000	6,24	66,76
Jepara	2011	554.400	14.004.325,03	758.000	3,59	67,63
Jepara	2012	573.128	14.824.995,87	800.000	4,52	68,45
Jepara	2013	559.067	15.623.738,87	875.000	7,95	69,11
Jepara	2014	560.456	16.374.715,21	1.000.000	9,87	69,61
Jepara	2015	583.388	17.210.365,92	1.150.000	4,57	70,02
Jepara	2016	583.388	18.080.634,88	1.350.000	3,45	70,25
Jepara	2017	609.391	19.054.540,81	1.600.000	2,83	70,79
Jepara	2018	617.552	20.169.685,17	1.739.360	4,2	71,38
Demak	2010	492.570	11.647.735,65	813.400	6,87	66,02
Demak	2011	504.037	12.275.702,69	847.987	3,49	66,84
Demak	2012	507.125	12.823.227,04	893.000	4,1	67,55
Demak	2013	507.256	13.499.226,47	995.000	8,22	68,38
Demak	2014	523.462	14.078.419,80	1.280.000	8,69	68,95
Demak	2015	534.301	14.912.999,60	1.535.000	2,8	69,75

Kab/Kota	Tahun	TK (Jiwa)	PDRB (Juta Rupiah)	UMK (Rupiah)	Inflasi (%)	IPM (Peringkat Nilai)
Demak	2016	534.301	15.672.482,50	1.745.000	2,27	70,1
Demak	2017	549.295	16.584.027,68	1.900.000	3,57	70,41
Demak	2018	564.864	17.474.052,00	2.065.490	2,73	71,26
Semarang	2010	502.705	21.572.136,87	824.000	7,07	69,58
Semarang	2011	509.650	22.925.456,80	880.000	3,29	70,35
Semarang	2012	530.955	24.306.718,35	941.600	4,56	70,88
Semarang	2013	528.560	25.758.121,08	1.051.000	8,11	71,29
Semarang	2014	543.980	27.264.112,96	1.208.200	8,63	71,65
Semarang	2015	564.211	28.768.327,30	1.419.000	2,85	71,89
Semarang	2016	564.211	30.292.468,04	1.610.000	2,39	72,4
Semarang	2017	596.297	32.004.085,35	1.745.000	3,67	73,2
Semarang	2018	570.290	33.857.648,85	1.900.000	2,8	73,61
Temanggung	2010	396.063	9.710.199,27	709.500	7,35	63,08
Temanggung	2011	394.163	10.301.569,79	779.000	2,42	64,14
Temanggung	2012	407.953	10.740.983,02	866.000	4,73	64,91
Temanggung	2013	404.083	11.299.342,97	940.000	7,01	65,52
Temanggung	2014	416.958	11.867.679,59	1.050.000	7,81	65,97
Temanggung	2015	423.256	12.489.394,54	1.178.000	2,74	67,07
Temanggung	2016	423.256	13.116.363,64	1.313.000	2,42	67,6
Temanggung	2017	421.481	13.754.614,81	1.431.500	3,12	68,34
Temanggung	2018	423.133	14.452.019,21	1.557.000	2,89	68,83

Kab/Kota	Tahun	TK (Jiwa)	PDRB (Juta Rupiah)	UMK (Rupiah)	Inflasi (%)	IPM (Peringkat Nilai)
Kendal	2010	447.120	18.798.278,37	780.000	5,89	66,23
Kendal	2011	447.340	20.032.434,32	843.750	3,49	66,96
Kendal	2012	467.860	21.075.717,33	893.000	3,89	67,55
Kendal	2013	467.246	22.386.123,50	953.100	6,9	67,98
Kendal	2014	470.254	23.536.834,39	1.206.000	8,34	68,46
Kendal	2015	435.045	24.762.325,36	1.383.450	4,13	69,57
Kendal	2016	435.045	26.139.414,95	1.639.600	2,47	70,11
Kendal	2017	460.967	27.665.643,32	1.774.867	3,6	70,62
Kendal	2018	457.814	29.186.390,49	1.929.458	2,16	71,28
Batang	2010	353.214	9.447.328,38	745.000	6,62	61,64
Batang	2011	359.528	10.025.044,65	805.000	3,01	62,59
Batang	2012	366.290	10.488.456,63	880.000	3,83	63,09
Batang	2013	359.366	11.104.696,78	970.000	8,08	63,6
Batang	2014	366.284	11.693.897,06	1.146.000	7,66	64,07
Batang	2015	361.065	12.328.239,23	1.270.000	2,94	65,46
Batang	2016	361.065	12.948.191,13	1.467.500	2,24	66,38
Batang	2017	365.710	13.666.579,80	1.603.000	3,44	67,35
Batang	2018	389.471	14.448.522,77	1.749.900	2,36	67,86
Pekalongan	2010	401.931	10.254.315,35	760.000	6,54	63,75
Pekalongan	2011	412.641	10.834.201,09	810.000	2,65	64,72
Pekalongan	2012	416.164	11.354.849,90	873.000	2,96	65,33

Kab/Kota	Tahun	TK (Jiwa)	PDRB (Juta Rupiah)	UMK (Rupiah)	Inflasi (%)	IPM (Peringkat Nilai)
Pekalongan	2013	410.144	12.034.805,89	962.000	8,18	66,26
Pekalongan	2014	410.625	12.630.368,82	1.145.000	8,32	66,98
Pekalongan	2015	390.027	13.234.564,04	1.271.000	3,42	67,4
Pekalongan	2016	390.027	13.921.651,83	1.463.000	2,96	67,71
Pekalongan	2017	441.290	14.679.128,72	1.583.698	4,01	68,4
Pekalongan	2018	441.686	15.524.820,69	1.721.638	2,83	68,97
Pemalang	2010	515.127	11.282.196,10	675.000	7,38	58,64
Pemalang	2011	537.658	11.847.199,06	725.000	2,8	59,66
Pemalang	2012	592.918	12.477.235,25	793.000	4,04	60,78
Pemalang	2013	573.469	13.172.063,61	908.000	6,52	61,81
Pemalang	2014	593.820	13.898.669,42	1.066.000	7,38	62,35
Pemalang	2015	553.935	14.673.696,23	1.193.400	3,52	63,7
Pemalang	2016	553.935	15.469.800,59	1.325.000	2,33	64,17
Pemalang	2017	587.819	16.343.954,00	1.460.000	3,64	65,04
Pemalang	2018	582.895	17.286.696,64	1.588.000	2,95	65,67
Tegal	2010	585.618	15.106.509,91	687.000	6,44	61,14
Tegal	2011	582.100	16.071.820,41	725.000	2,74	61,97
Tegal	2012	608.585	16.912.249,74	795.000	4,13	62,67
Tegal	2013	592.058	18.050.291,97	850.000	7,79	63,5
Tegal	2014	597.079	18.958.841,04	1.000.000	8,48	64,1
Tegal	2015	569.566	19.999.475,45	1.155.000	3,64	65,04

Kab/Kota	Tahun	TK (Jiwa)	PDRB (Juta Rupiah)	UMK (Rupiah)	Inflasi (%)	IPM (Peringkat Nilai)
Tegal	2016	569.566	21.182.917,23	1.373.000	2,67	65,84
Tegal	2017	645.162	22.322.100,13	1.487.000	3,58	66,44
Tegal	2018	630.593	23.552.548,37	1.617.000	2,95	67,33
Brebes	2010	812.098	20.158.107,77	681.000	6,04	59,49
Brebes	2011	711.917	21.498.422,48	717.000	3,09	60,51
Brebes	2012	748.905	22.482.262,67	775.000	4,61	60,92
Brebes	2013	847.055	23.812.056,92	859.000	9,83	61,87
Brebes	2014	763.581	25.074.171,51	1.000.000	6,2	62,55
Brebes	2015	767.841	26.572.834,89	1.166.550	3,08	63,18
Brebes	2016	767.841	27.930.986,28	1.310.000	2,84	63,98
Brebes	2017	823.661	29.527.028,83	1.418.100	4,24	64,86
Brebes	2018	832.405	31.094.896,54	1.542.000	3,09	65,68
Magelang	2010	53.719	4.010.718,18	745.000	6,8	73,99
Magelang	2011	58.395	4.255.662,21	795.000	4,15	74,47
Magelang	2012	58.542	4.484.268,08	837.000	2,59	75
Magelang	2013	59.567	4.755.092,20	915.900	7,79	75,29
Magelang	2014	59.628	4.992.112,82	1.145.000	7,92	75,79
Magelang	2015	57.133	5.247.341,27	1.211.000	2,7	76,39
Magelang	2016	57.133	5.521.525,54	1.341.000	2,25	77,16
Magelang	2017	58.582	5.820.532,00	1.453.000	3,9	77,84
Magelang	2018	63.151	6.145.869,75	1.580.000	2,65	78,31

Kab/Kota	Tahun	TK (Jiwa)	PDRB (Juta Rupiah)	UMK (Rupiah)	Inflasi (%)	IPM (Peringkat Nilai)
Surakarta	2010	235.998	21.469.551,30	785.000	6,65	77,45
Surakarta	2011	243.267	22.848.439,42	826.252	1,93	78
Surakarta	2012	261.022	24.123.781,59	864.450	2,87	78,44
Surakarta	2013	266.748	25.631.681,32	974.000	8,32	78,89
Surakarta	2014	258.234	26.984.358,61	1.170.000	8,01	79,34
Surakarta	2015	271.199	28.453.493,87	1.222.400	2,56	80,14
Surakarta	2016	271.199	29.975.873,01	1.418.000	2,15	80,76
Surakarta	2017	259.394	31.685.480,46	1.534.985	3,1	80,85
Surakarta	2018	259.465	33.506.170,40	1.668.700	2,45	81,46
Salatiga	2010	73.329	5.845.475,81	803.185	6,65	78,35
Salatiga	2011	82.506	6.230.219,49	843.469	2,84	78,76
Salatiga	2012	87.321	6.574.907,26	901.396	4,12	79,1
Salatiga	2013	88.542	6.989.045,50	1.209.100	7,67	79,37
Salatiga	2014	88.149	7.378.042,82	1.423.500	7,84	79,98
Salatiga	2015	84.380	7.759.181,62	1.287.000	2,61	80,96
Salatiga	2016	84.380	8.168.241,90	1.450.953	2,19	81,14
Salatiga	2017	100.834	8.629.396,45	1.596.845	3,5	81,68
Salatiga	2018	103.982	9.104.841,00	1.735.930	2,47	82,41
Semarang	2010	724.687	80.824.099,97	939.756	7,11	76,96
Semarang	2011	781.148	86.142.966,70	961.323	2,87	77,58
Semarang	2012	795.245	91.282.029,07	991.500	0,41	78,04

Kab/Kota	Tahun	TK (Jiwa)	PDRB (Juta Rupiah)	UMK (Rupiah)	Inflasi (%)	IPM (Peringkat Nilai)
Semarang	2013	802.747	96.985.402,04	980.000	8,19	78,68
Semarang	2014	820.317	103.109.874,91	1.165.000	8,53	79,24
Semarang	2015	836.837	109.110.689,61	1.685.000	2,56	80,23
Semarang	2016	836.837	115.542.560,57	1.909.000	2,32	81,19
Semarang	2017	899.796	123.107.015,15	2.125.000	3,64	82,01
Semarang	2018	872.827	131.137.259,65	2.310.088	2,76	82,72
Pekalongan	2010	134.984	4.624.260,08	760.000	6,77	68,95
Pekalongan	2011	131.982	4.878.332,22	810.000	2,45	69,54
Pekalongan	2012	136.948	5.151.813,52	895.500	3,55	69,95
Pekalongan	2013	135.251	5.456.196,88	860.000	7,4	70,82
Pekalongan	2014	143.343	5.755.282,26	1.044.000	7,82	71,53
Pekalongan	2015	143.376	6.043.095,73	1.291.000	3,46	72,69
Pekalongan	2016	143.376	6.367.272,96	1.500.000	2,94	73,32
Pekalongan	2017	149.487	6.706.278,70	1.623.750	3,61	73,77
Pekalongan	2018	151.597	7.087.915,58	1.765.179	2,92	74,24
Tegal	2010	107.613	6.895.713,33	700.000	6,73	69,33
Tegal	2011	102.271	7.341.540,16	735.000	2,58	70,03
Tegal	2012	104.429	7.650.479,56	795.000	0,4	70,68
Tegal	2013	117.091	8.084.175,73	914.276	5,8	71,44
Tegal	2014	108.480	8.491.325,37	1.066.603	7,4	72,2
Tegal	2015	110.942	8.953.879,56	1.206.000	3,95	72,96

Kab/Kota	Tahun	TK (Jiwa)	PDRB (Juta Rupiah)	UMK (Rupiah)	Inflasi (%)	IPM (Peringkat Nilai)
Tegal	2016	110.942	9.445.030,96	1.385.000	2,71	73,55
Tegal	2017	114.521	10.006.893,00	1.499.500	4,03	73,95
Tegal	2018	113.762	10.599.407,23	1.630.500	3,08	74,44

Lampiran II**Hasil Estimasi Common Effect**

Dependent Variable: LOG(Y)

Method: Panel Least Squares

Date: 11/29/19 Time: 10:37

Sample: 2010 2018

Periods included: 9

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 315

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.516510	0.919878	4.909899	0.0000
LOG(X1)	0.687577	0.027414	25.08118	0.0000
LOG(X2)	0.157439	0.071251	2.209625	0.0279
X3	-0.000745	0.008275	-0.089986	0.9284
X4	-0.075302	0.003917	-19.22592	0.0000
R-squared	0.752518	Mean dependent var		12.93408
Adjusted R-squared	0.749325	S.D. dependent var		0.599829
S.E. of regression	0.300319	Akaike info criterion		0.447803
Sum squared resid	27.95936	Schwarz criterion		0.507367
Log likelihood	-65.52891	Hannan-Quinn criter.		0.471601
F-statistic	235.6543	Durbin-Watson stat		0.024784
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran III**Hasil Estimasi Fixed Effect**

Dependent Variable: LOG(Y)

Method: Panel Least Squares

Date: 11/29/19 Time: 10:38

Sample: 2010 2018

Periods included: 9

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 315

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.410906	0.790733	11.90150	0.0000
LOG(X1)	0.211969	0.074086	2.861120	0.0045
LOG(X2)	0.024275	0.033694	0.720452	0.4719
X3	0.002083	0.001023	2.036955	0.0426
X4	-0.005112	0.005572	-0.917482	0.3597

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.996750	Mean dependent var	12.93408
Adjusted R-squared	0.996303	S.D. dependent var	0.599829
S.E. of regression	0.036471	Akaike info criterion	-3.669140
Sum squared resid	0.367121	Schwarz criterion	-3.204536
Log likelihood	616.8895	Hannan-Quinn criter.	-3.483513
F-statistic	2227.852	Durbin-Watson stat	1.489402
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran IV**Hasil Estimasi Random Effect**

Dependent Variable: LOG(Y)

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 11/29/19 Time: 10:39

Sample: 2010 2018

Periods included: 9

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 315

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.890652	0.599858	11.48715	0.0000
LOG(X1)	0.444268	0.055696	7.976626	0.0000
LOG(X2)	0.010934	0.030403	0.359628	0.7194
X3	0.002006	0.001022	1.963269	0.0505
X4	-0.021893	0.004866	-4.498881	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.314498	0.9867
Idiosyncratic random			0.036471	0.0133
Weighted Statistics				
R-squared	0.387435	Mean dependent var		0.499601
Adjusted R-squared	0.379531	S.D. dependent var		0.048843
S.E. of regression	0.038474	Sum squared resid		0.458875
F-statistic	49.01713	Durbin-Watson stat		1.202338
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.551344	Mean dependent var		12.93408
Sum squared resid	50.68712	Durbin-Watson stat		0.010885

Lampiran V

Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	610.109387	(34,276)	0.0000
Cross-section Chi-square	1364.836857	34	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: LOG(Y)

Method: Panel Least Squares

Date: 11/29/19 Time: 10:39

Sample: 2010 2018

Periods included: 9

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 315

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.516510	0.919878	4.909899	0.0000
LOG(X1)	0.687577	0.027414	25.08118	0.0000
LOG(X2)	0.157439	0.071251	2.209625	0.0279
X3	-0.000745	0.008275	-0.089986	0.9284
X4	-0.075302	0.003917	-19.22592	0.0000
R-squared	0.752518	Mean dependent var		12.93408
Adjusted R-squared	0.749325	S.D. dependent var		0.599829
S.E. of regression	0.300319	Akaike info criterion		0.447803
Sum squared resid	27.95936	Schwarz criterion		0.507367
Log likelihood	-65.52891	Hannan-Quinn criter.		0.471601
F-statistic	235.6543	Durbin-Watson stat		0.024784
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran VI**Uji Hausman**

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	38.980293	4	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOG(X1)	0.211969	0.444268	0.002387	0.0000
LOG(X2)	0.024275	0.010934	0.000211	0.3583
X3	0.002083	0.002006	0.000000	0.0690
X4	-0.005112	-0.021893	0.000007	0.0000

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: LOG(Y)

Method: Panel Least Squares

Date: 11/29/19 Time: 10:40

Sample: 2010 2018

Periods included: 9

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 315

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.410906	0.790733	11.90150	0.0000
LOG(X1)	0.211969	0.074086	2.861120	0.0045
LOG(X2)	0.024275	0.033694	0.720452	0.4719
X3	0.002083	0.001023	2.036955	0.0426
X4	-0.005112	0.005572	-0.917482	0.3597

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.996750	Mean dependent var	12.93408
Adjusted R-squared	0.996303	S.D. dependent var	0.599829
S.E. of regression	0.036471	Akaike info criterion	-3.669140
Sum squared resid	0.367121	Schwarz criterion	-3.204536
Log likelihood	616.8895	Hannan-Quinn criter.	-3.483513
F-statistic	2227.852	Durbin-Watson stat	1.489402
Prob(F-statistic)	0.000000		
